

STUDI KASUS KEBERADAAN BENDUNGAN KARALLOE

DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA

(Dalam Tinjauan *Enviromental Ethics*)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Sosiologi



Oleh

Yuyun Karlina

NIM. 105091102521

PRODI MAGISTER PENDIDIKAN SOSIOLOGI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

PENGESAHAN TESIS

**STUDI KASUS KEBERADAAN BENDUNGAN KARALLOE DI KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA (DALAM TINJAUAN *ENVIROMENTAL
ETHICS*)**

Oleh

Yuyun Karlina
105091102521

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D


Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 813949


Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM. 988462

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul : Studi Kasus Keberadaan Bendungan Karalloe di
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Dalam
Tinjauan *Enviromental Ethics*)
Nama : Yuyun Karlina
NIM : 105091102521
Program Studi : Magister Pendidikan Sosiologi

Telah diuji dan dipertahankan di depan penguji Tesis pada tanggal 04 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Sosiologi pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Agustus 2023

Tim Penguji

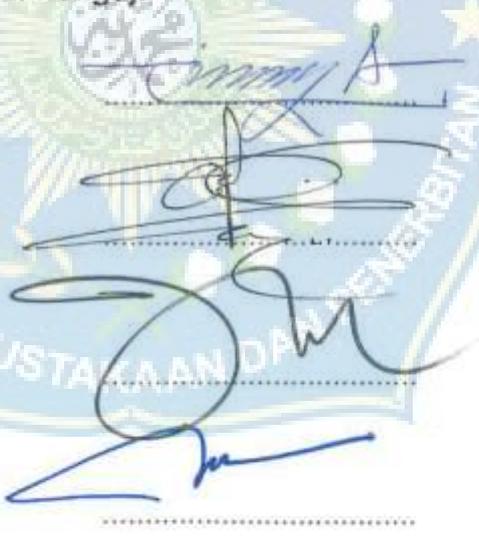
Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
(Pimpinan/penguji)

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D
(Pembimbing 1/penguji)

Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd
(Pembimbing II/penguji)

Prof. Dr. H. Nursalam, M.Si.
(Penguji)

Dr. Fatimah Azis, M.Pd
(Penguji)



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata ada naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 02 Mei 2023

Materai 10.000 ttd

Yuyun Karlina
NIM. 105091102521

MOTTO DAN PERUNTUKKAN

“Hidup itu seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak”



Dengan segala kerendahan hati

Kuperuntukan karya ini

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta

Serta adikku terkasih

Yang dengan tulus dan ikhlas selalu berdo'a dan membantu

Baik moril maupun material dalam keberhasilan penulis.

Semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya

Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam penyelesaian Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberi saya kekuatan dan kesabaran dalam menjalani Tesis ini.
2. Prof.. Dr. Irwan Akib, M.Pd, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para Wakil Direktur I (Nama), Direktur II (Nama), dan Direktur III (Nama) yang mendukung penyelesaian Tesis ini.
3. Kaharuddin, S.Pd.,M.Pd.,Ph.D selaku Ketua Prodi Magister Pendidikan Sosiologi yang banyak memberikan dukungan, motivasi dan arahan dalam proses penyelesaian Tesis ini.
4. Kaharuddin, S.Pd.,M.Pd.,Ph.D dan Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd pembimbing utama dan pembimbing pendamping Tesis ini, yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan Tesis ini.
5. Ucapan yang tak terbatas kepada Arfah Daeng Sewang dan Ridawati Daeng Kebo' selaku orang tua kami yang banyak berkorban materi dan pikiran dalam proses perkuliahan sampai penulisan Tesis ini selesai dan pencapaian Gelar Magister Pendidikan Sosiologi terwujud.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tesis ini, meskipun telah diusahakan sebaik mungkin. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kekhilafan dari penulis, namun penulis berharap semoga Tesis ini ada manfaatnya bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian tentang *enviromental ethics*.

Makassar, 02 Mei 2023

Penulis,

Yuyun Karlina



ABSTRAK

Bendungan Karalloe merupakan bendungan yang dibangun untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Desa Taring dan Kabupaten Jeneponto seperti pengairan bagi sistem irigasi, penanggulangan banjir, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis keberadaan Bendungan Karalloe apabila ditinjau dalam kajian *enviromental Ethics*.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis teori Sosiologi Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, dan teori Modernisasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik penentuan informan yaitu *snowball sampling*. Lokasi penelitian berada di Dusun Rajayya Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Bendungan Karalloe dibangun berdasarkan pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai analisis lingkungan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Lokasi bendungan Karalloe dinilai bagus sebab lokasi yang berada didataran tinggi dan keadaan sungai yang sesuai dengan standar internasional, meskipun pada awal pembangunan dilakukan perombakan secara besar-besaran seperti penggundulan bukit, pembebaasan lahan dan penebangan pohon. Namun setelah diresmikan dilakukan kembali penghijauan dengan menanam berbagai jenis pohon disekitar kawasan bendungan. Selain itu juga terdapat masalah antaran pemerintah dan masyarakat terkait pembebasan lahan yang masih belum terselesaikan. Masyarakat menolak untuk dibayar atas hak ganti rugi kepemilikan tanah dan isinya karena adanya propokator yang dilakukan oleh masyarakat lain.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam tinjauan *enviromental Ethics*, keberadaan Bendungan Karalloe telah fokus pada perbaikan lingkungan yang semula telah dibabat habis untuk perluasan wilayah pembangunan bendungan dengan melakukan reboisasi dan penguatan bukit yang ada. Dengan kebijakan yang dilakukan maka pembangunan bendungan dapat bermanfaat bagi kehidupan saat ini begitu pula dimasa yang akan datang sebagaimana dalam teori pembangunan berkelanjutan (*sustanaible development*) yang fokus utamanya pada pemanfaatan lingkungan secara wajar untuk keberlanjutan pembangunan yang maksimal.

Kata Kunci; Bendungan Karalloe, Enviromental Ethics, Pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

The Karalloe Dam is a dam built to provide benefits for the people of Taring Village and Jeneponto Regency such as irrigation for irrigation systems, flood prevention, employment opportunities and so on. The purpose of this study is to examine and analyze the existence of the Karalloe Dam when viewed from an environmental ethics study.

Researchers used qualitative research methods with analysis of Environmental Sociology theory, Sustainable Development, and Modernization theory. This study also uses a case study approach with the technique of determining informants, namely snowball sampling. The research location is in Rajayya Hamlet, Taring Village, Biringbulu District, Gowa Regency.

The results of this study indicate that the existence of the Karalloe Dam was built based on in-depth considerations and studies regarding environmental analysis and benefits for people's lives. The location of the Karalloe Dam is considered good because the location is in the highlands and the condition of the river is in accordance with international standards, even though at the beginning of the construction there were major renovations such as hill clearing, land acquisition and tree felling. However, after it was inaugurated, re-greening was carried out by planting various types of trees around the dam area. In addition, there are also problems between the government and the community related to land acquisition which are still unresolved. The community refuses to be paid for the right to compensation for ownership of the land and its contents because of the propagation by other communities.

The conclusion of this study is that in a review of environmental ethics, the existence of the Karalloe Dam has focused on improving the environment which had previously been cleared to expand the dam construction area by reforestation and strengthening the existing hills. With the policies implemented, the construction of dams can benefit current life as well as in the future as in the theory of sustainable development which focuses primarily on natural use of the environment for maximum sustainable development.

Keywords; Karalloe Dam, Environmental Ethics, Sustainable development.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat empat ketrampilan berbahasa kepada manusia yang terdiri dari ketrampilan menyimak yang berkaitan dengan pendengaran yang di perintahkan untuk mendengar hal yang baik-baik saja. Kemudian, ketrampilan membaca yang berkaitan dengan penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah *Subhana wata'ala*. Penulis bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah *Subhanahu wata'ala*.

Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan *Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Beliau adalah nabi yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliahan dan membentangkan permaidani keislaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sehingga umat manusia dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua ayahanda Arfa Daeng Sewang dan ibu Ridawati Daeng Kebo' tercinta atas doa dan kasih sayangnya yang tak pernah padam mendoakan anaknya agar menjadi orang yang sukses. Penulis tak pernah lupa atas semua yang telah mereka berikan. Semoga mereka selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan dilindungi Allah *Subhana Wata'ala*.

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. Direktur Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Makassar, Kaharuddin S.Pd., M.Pd., Ph.D. Ketua Prodi
Ketua Prodi Pendidikan Sosiolog.

Kaharuddin S.Pd., M.Pd., Ph.D. Selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi ini dan Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd Selaku pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama pembimbingan pembuatan Tesis, Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, sahabat yang selalu mensupport untuk menyelesaikan Tesis ini, Seluruh teman-teman angkatan, terutama untuk kelas Sosiologi 2021 Pascasarjana yang senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi menyenangkan, Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Billahi Fii sabililhaq, fastabiqul khairat, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 02 Mei 2023

Penulis

YUYUN KARLINA
NIM. 105091102521

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KARTU KONTROL BIMBINGAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO DAN PERUNTUKAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kajian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Konsep	11
B. Landasan Teori	18
C. Kerangka Pikir	25
D. Kajian Relevan	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Instrumen Penelitian	35
D. Teknik Penentuan Informan	36
E. Jenis Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
H. Teknik Pengabsahan Data	40
I. Etika Penelitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PENELITIAN	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
B. Pembahasan	79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	26



DAFTAR TABEL

Gambar	Judul	Halaman
3.1	Jadwal Penelitian	35
4.1	Informan Penelitian	49



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara Kepala Desa	100
2	Pedoman Wawancara Petugas Operasa	102
3	Pedoman Wawancara Masyarakat	103
4	Dokumentasi Peenelitian	104
5	Persuratan	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengkajian tentang *Environmental Ethics* telah banyak dilakukan oleh para ahli lingkungan dan Sosiologi, seperti yang telah dilakukan oleh Riley Dunlap dan Willian Catton pada tahun 1978 mereka menulis dua artikel yang menandai upaya mendirikan suatu cabang Sosiologi dengan kajian Sosiologi Lingkungan dan diberi nama *Environment Sociology* (Susilo, 2014). Salah-satu alasan artikel yang dituliskan ini dibangun yakni atas dasar persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan Sosiologi konvensional untuk membicarakan persoalan tersebut yang merupakan cabang dari pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-dasar biofisik struktur sosial dan kehidupan sosial.

Permasalahan-permasalahan berkaitan tentang lingkungan masih dirasakan hingga saat ini, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setyaningsih, Sriyono dan Andi Irwan Benardi tentang kerusakan lingkungan sungai Kreo akibat pembangunan pemukiman di sekitar Waduk Jatibarang Kota Semarang. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bertambahnya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan pemukiman penduduk menyebabkan ekspansi area area hijau, hal ini menyebabkan dampak terhadap kerusakan lahan di wilayah DAS Kreo Kota Semarang (Setyaningsih et al., 2018). Fakta lain juga terdapat

dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailatul Shiamah dan Nawiyanto mengenai pengaruh bendungan Wlingi terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat di sepanjang saluran irigasi Lodoyo Tulungagung tahun 1970-1990 melihat dampak positif dari keberadaan bendungan bagi lingkungan sekitar berupa alternatif pengendali banjir dan pasir serta budi daya ikan tawar (Shiamah & Nawiyanto, 2020).

Kajian yang sama dalam penelitian ini mengenai pembangunan Bendungan Karalloe dalam tinjauan *enviromental ethics*. Nyatanya pembangunan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, pada pembangunan dengan daya dukung lingkungan yang sudah melampaui batas wajar mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam, dan cuaca ekstrim yang sering terjadi setiap tahunnya (Rahadian, 2016). Hal ini menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan pada setiap daerah untuk menentukan langkah yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan pembangunan.

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk membuat keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku (Rosana, 2018). Namun, Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan banyak hal yang belum dipahami sehingga menimbulkan kerancauan dalam pengaturan dan tahap pengimplementasiannya (Jazuli, 2015). Dalam rangka mengupayakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat, pemerintah jelas harus memperhatikan pada aspek jangka panjangnya. Dalam hal ini berkaitan dengan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Prathama et al., 2020).

Hal tersebut dapat dilihat sejak tahun 1992, dalam rangka sebagai upaya meniti pembangunan yang berkelanjutan Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Undang-undang nomor 23 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai pada rencana 21 nasional dengan tujuan memasukkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan hukum nasional (Muhar, 2017).

Emil Salim mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi manusia (Hapsoro & Bangun, 2020). Melalui program pembangunan yang dilakukan pemerintah tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup Bumi dan generasi mendatang jelas akan menimbulkan dampak negatif (Klarin, 2018). Kondisi tersebut akan menimbulkan perubahan perilaku yang tidak mengarah pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih rasional dan efisien sehingga dapat menimbulkan lebih banyak tekanan dan dampak terhadap lingkungan.

Namun, Perkembangan dalam studi pembangunan pada masa kini sangat relevan karena semakin banyaknya permasalahan dalam pembangunan, bukan hanya pada negara-negara berkembang akan tetapi terjadi pula di negara-negara maju. Permasalahan sosial yang muncul tak lain disebabkan oleh pembangunan dengan tidak memperhatikan ekosistem pendukungnya. Strategi dalam pembangunan harus memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial, selain itu pembangunan juga harus mampu menghargai keanekaragaman dan melihat manfaat yang dihasilkan pembangunan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang (Rahadian, 2016). Dengan pemanfaatan lingkungan yang baik dalam proses pembangunan maka akan berdampak baik bagi generasi selanjutnya. Pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan permasalahan lingkungan merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Duran et al., 2015).

Pada penelitian kali ini, membahas mengenai pembangunan bendungan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dengan melihat pada aspek etika lingkungan (*enviromental ithics*). Konstruksi fisik bendungan berupa timbunan tanah, timbunan batuan, beton atau pasangan bata yang dibangun selain untuk menampung dan menyimpan air, dapat juga dibangun untuk menampung limbah pertambangan (tailing) atau untuk menahan lumpur agar terbentuk sebuah waduk. Bendungan dibangun

diatas bentaran sungai yang luas untuk membendung air dengan berbagai manfaat yang diberikan, namun selain itu ternyata pembangunan bendungan juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan serta bendungan juga dapat mendatangkan masalah ekologi dengan berkurangnya jumlah sungai-sungai yang harusnya mengalir bebas diseluruh dunia sebanyak 21 persen.

Seperti halnya Bendungan Karalloe yang terletak di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Pembangunan bendungan Karalloe dilaksanakan di Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto tepatnya berada disungai yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelara-Karalloe, Bendungan Karalloe juga melintasi beberapa desa yang ada disekitar daerah tersebut. Sungai Kelara ini mempunyai anak-anak sungai yang cukup besar yakni sungai Karalloe (Rakhim & Sirajuddin, 2020).

Awal mula dibangunnya Bendungan Karalloe bukan tanpa alasan, pembangunan Bendungan Karalloe dinilai mampu memecahkan berbagai persoalan yang ada seperti dirancangnya Bendungan Karalloe untuk menampung bibit air yang meningkat akibat curah hujan sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir dan bencana alam lainnya. Selain itu, air yang ditampung tersebut juga berfungsi sebagai pasokan dan cadangan air untuk mengairi persawahan masyarakat sekitar. Sehingga para petani padi, jagung dan berbagai tumbuhan lainnya di panen

beberapa kali dalam setahun meskipun tidak dalam kondisi musim hujan.

Sebelum Bendungan Karalloe diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 23 November tahun 2021, telah terjadi bencana alam yang cukup besar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pada bulan Oktober 2018 Indonesia telah memasuki musim hujan khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Hampir seluruh wilayah diguyur hujan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Memasuki awal tahun 2019 tepatnya pada tanggal 22 Januari Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak banjir dan tanah longsor. Banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang berkepanjangan sehingga air sungai menjadi meluap memasuki area pemukiman warga yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kehilangan harta benda. Di Kabupaten Jeneponto sendiri sebanyak 438 rumah rusak parah dan lima belas jembatan ambruk, kerugian material diperkirakan mencapai dua ratus miliar (Syam et al., 2021). Dalam merespon masalah banjir yang banyak memakan korban jiwa, pemerintah mengupayakan agar bendungan Karalloe yang sementara dalam tahap pembangunan dapat segera terselesaikan, sehingga menjadi solusi untuk mencegah datangnya banjir ditahun-tahun berikutnya.

Dengan berbagai fungsi yang diperoleh dengan pembangunan Bendungan Karalloe ini, ternyata juga mendatangkan disfungsi dalam

beberapa hal. Bendungan Karalloe terbentang luas diatas sungai Kelara dengan berbagai ekosistem yang hidup didalamnya, keberadaan bendungan ini tentu mengakibatkan berkurangnya tempat berkembang biak bagi spesies sungai yang ada disana. Jika biasanya masyarakat dapat menjadikan sungai tersebut sebagai tempat mencari ikan dan sebagainya kini hal tersebut menjadi kian terbatas.

Daerah sekitar sungai juga semakin tandus, akibatnya hawa panas sangat mendominasi didaerah tersebut. Pohon-pohon ditebang, bukit-bukit di ratakan untuk memperluas lahan pembangunan Bendungan Karalloe. Hal ini dapat berpotensi longsor dimasa yang akan datang bila mana tidak ditindaklanjuti dari sekarang. Selain itu, lahan pembangunan Bendungan Karalloe juga merupakan lahan perkebunan milik warga yang sejak awal direncanakannya pembangunan Bendungan Karalloe menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Mulanya masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tidak setuju jika perkebunan milik mereka akan dialih fungsikan dalam pembangunan Bendungan Karalloe namun dengan adanya janji ganti rugi atas kepemilikan tanah, tanaman, serta bangunan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah sehingga masyarakat dapat merasa aman bila mana perkebunan mereka akan dijadikan sebagai lahan dibangunnya Bendungan Karalloe.

Sebagaimana yang tercantum pada surat perjanjian Badan Nasional (BNP) Kabupaten Gowa pada bulan Oktober tahun 2015 bahwa setelah dilakukan pengukuran maka akan dilakukan kembali musyawarah terkait harga dan sertifikat program nasional. Namun pada kenyataannya, kesepakatan antara pihak pemerintah dan masyarakat tidak menemukan titik terang. Sehingga pada tanggal 16 Maret 2017 kontak fisik masyarakat dan pihak berwenang tidak dapat terelakkan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat, namun pembebasan lahan tetap dilakukan. Sehingga pembangunan Bendungan Karalloe dianggap mengatasi masalah yang ada namun mendatangkan masalah yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan Bendungan Karalloe dibangun berdasarkan pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai analisis lingkungan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keadaan Lingkungan Masyarakat Terhadap Keberadaan Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan *Enviromental Ethics* ?
2. Bagaimana Dampak Bendungan Dalam Tinjauan Fungsi dan Disfungsi ?

3. Bagaimana Implikasi Teori dan Kebijakan Dalam Penelitian Keberadaan Pembangunan Bendungan Karalloe Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Dalam Tinjauan *Enviromental Ethics*) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Keadaan Lingkungan Masyarakat Terhadap Keberadaan Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan *Enviromental Ethics*
2. Untuk Menganalisis Dampak Dari Keberadaan Bendungan Dalam Tinjauan Fungsi dan Disfungsi
3. Untuk Menganalisis Implikasi Teori dan Kebijakan Dalam Penelitian Studi Kajian *Enviromental Ethics* Terhadap Pembangunan Bendungan Karalloe Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mempertajam kajian-kajian tentang Sosiologi Lingkungan yang termuat dalam jurnal-jurnal yang terpercaya..

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan daerah tentang pentingnya pengkajian terhadap lingkungan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para pembaca untuk melakukan penelitian yang sama mengenai kajian *enviromental ethics* serta dapat menambah wawasan dan meningkatkan daya kritis dan analisis peneliti sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Defenisi Operasional

Bendungan Karalloe dalam tinjauan *enviromental ethics* dijelaskan dalam pembahasan berikut :

Bendungan Karalloe dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti aspek agraris dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Namun pada pengelolaanya, menimbulkan dampak positif dan negatif khususnya bagi lingkungan sekitar. Kajian ini fokus pada fungsi dan disfungsi Bendungan Karalloe terhadap masyarakat sekitar serta implikasinya terhadap teori dan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Undang-Undang Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan gabungan dari berbagai aspek jasmani yang terdiri dari sumber daya alam seperti air, tanah, energi surya, tumbuhan dan hewan baik yang darat maupun yang dilaut. Berbagai macam kebutuhan hidup manusia bisa diperoleh melalui lingkungan. Manusia mengonsumsi makanan setiap harinya merupakan hasil yang didapat melalui alam, seperti padi, sayur-sayuran, ikan dan sebagainya. Begitupun dengan pakaian yang manusia pakai sehari-hari, bahan yang digunakan untuk membuat pakain berasal dari alam seperti kapas untuk membuat benang. Sehingga manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat, menjaga dan melestarikan lingkungan agar dapat bertahan sepanjang masa (Purwanti, 2017).

Dalam mengatur eksistensi lingkungan agar dapat dinikmati sampai generasi selanjutnya, pemerintah mengeluarkan berbagai aturan yang mengatur tentang lingkungan. Adapun beberapa produk hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup seperti : UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 7 & 8/1999 dan UU No. 5/1990 tentang Daftar Nama Satwa yang Dilindungi, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Nomor: Kep-03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri yang Sudah Beroperasi, ISO 14001 tentang peneglolaan dan standardisasi lingkungan bagi pelaku industri, dan lain sebagainya. Namun dengan berbagai aturan yang ada, tetap saja terjadi pelanggaran dimana-mana. Hal ini juga terlihat pada beberapa produk Undang-undang dalam pandangan aktivis lingkungan bersifat anti ekologis atau “merusak” lingkungan seperti Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41/2004 mengenai pemberian izin kepada 13 perusahaan tambang di kawasan hutan lindung yang disetujui. Hal ini dianggap adanya pikiran mendua yang dilakukan oleh pemerintah. Disatu sisi terdapat keinginan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagaimana visi pembangunan berkelanjutan, namun tidak sedikit pula keinginan untuk mengeksploitasi lingkungan untuk memaksimalkan pendapatan. Dalam hal ini cukup mengkhawatirkan sebab lingkungan dan sumber daya alam masih dianggap sebatas komoditas saja dan tempat berpenghasilan.

Begitupun dengan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga dapat

berdampak merusak lingkungan. Hal ini dapat terjadi ketika privatisasi disalahgunakan pemerintah sebagai *policy* untuk mencabut hal-hal kolektif atas air yang merupakan kepemilikan masyarakat sebab dalam undang-undang ini secara fundamental merekonstruksi prinsip penggunaan dan penguasaan air yang ada di masyarakat. Penerapan Undang-undang ini memiliki konsekuensi seperti , air yang merupakan milik masyarakat secara universal dan diperoleh secara bebas (*open acces*) berpotensi dikuasai oleh negara dengan adanya syarat perizinan. Penguasaan oleh negara ini dapat didelegasikan pada pihak swasta dengan adanya motif komersial.

Hakikatnya setiap individu harus menumbuh kembangkan sikap menjaga dan melestarikan lingkungan sejak dini. Pengembangan sikap menjaga dan melestarikan lingkungan dapat dilakukan dibangku sekolah. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Purwanti tentang Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan dan Implementasinya pada tahun 2017, mengatakan bahwa pendidikan untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan ditanamkan sejak dini melalui bangku sekolah, sehingga dapat mengelola dengan bijaksana sumber daya alam yang tersedia serta mengedepankan sikap tanggung jawab demi kepentingan generasi selanjutnya (Purwanti, 2017).

2. Bendungan Karalloe dalam Tinjauan *Enviromental Ethics*

Seiring perkembangan industri dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan secara global juga semakin bertambah khususnya bagi negara-negara berkembang. Pada negara-negara dengan berbagai persoalan tentu harus mendapatkan solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Pembangunan Bendungan Karalloe merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Bendungan Karalloe berada dekat sekali dengan pemukiman warga yang ada di Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dan beberapa wilayah lainnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan,

Bendungan Karalloe memiliki manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang pertanian. Sawah dan perkebunan masyarakat mendapatkan cadangan air agar panen bisa dilakukan beberapa kali dalam setahun. Dengan manfaat tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan daerah tersebut. Bendungan Karalloe menggunakan sumber daya alam yang tersedia, dengan memanfaatkan lahan sekitar sungai Kelara dan lingkungan yang ada disana memungkinkan Bendungan Karalloe memunculkan persoalan baru. Persoalan tersebut dapat berupa terganggunya habitat asli para biota-biota yang hidup didalam sungai, berkurangnya tempat mendapatkan ikan sebagai bahan makanan untuk masyarakat daerah tersebut, lahan pertanian dialih

fungsi menjadi bendungan sehingga hilangnya tempat para petani menanam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.

Lingkungan yang telah rusak tidak dapat di pulihkan dan diperbaiki kembali seperti sebelumnya (*irreversible enviromental damage*)(Said & Nurhayati, 2020). Dapat disimpulkan bahwa, kualitas lingkungan yang terganggu disebabkan karena eksploitasi lingkungan secara berlebihan, pencemaran lingkungan pun tidak langsung terjadi begitu saja namun melalui tahapan dan proses yang dilakukan berawal dari pengotoran lingkungan dengan zat tertentu dan material dalam waktu yang lama. Bila mana hal ini terjadi secara terus-menerus maka potensi rusaknya lingkungan jauh lebih banyak.

Keberadaan lingkungan yang terjaga memberikan peluang yang besar kepada manusia dalam mendapatkan dukungan melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Persoalan lingkungan adalah persoalan mempertahankan kehidupan, karena lingkungan merupakan tempat kehidupan. Kerusakan lingkungan berarti kerusakan pada tempat kehidupan dan akibatnya adalah kehancuran kehidupan. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesadaran etika, sehingga perilaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan menggambarkan hilangnya kesadaran terhadap etika lingkungan.

Selain kerusakan lingkungan dapat berdampak bagi kehidupan manusia, juga berdampak bagi kehidupan makhluk hidup yang ada

didalamnya. Hal ini tentu menjadi perhatian, sebab berpotensi pada keberlangsungan hidup selanjutnya. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, manusia harus mengedepankan akal sehat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jelaslah bahwa manusia memiliki etika dan hidup.

Etika dikenal sebagai tata krama, tata kelakuan, watak, perasaan sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* mempunyai arti adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika telah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Sehingga berdasarkan arti kata, maka etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau berkaitan adat dan kebiasaan. Manusia yang memiliki budi perkerti yang baik tentu harus memperhatikan keadaan lingkungan yang ada, sebab dalam ajaran agama pun telah dijelaskan untuk mengedepankan sikap menjaga. Namun pada perkembangannya, manusia menganggap bahwa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah semata-mata hanya diperuntukkan untuk kepentingan manusia diatas kepentingan makhluk lainnya, oleh karena itu manusia menggunakan segala apa yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam prosesnya, pembangunan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun yang perlu dipahami bahwa apakah pembangunan yang dilakukan dapat

bertahan lama?. Hal ini tentu dapat terjawab dalam penjelasan sebelumnya. Bila mana pembangunan yang dilakukan dapat mengedepankan persoalan lingkungan dan alam, maka pembangunan dan lingkungan dapat berkesinambungan dalam mendukung kehidupan.

3. Prespektif Sosiologi terhadap kajian lingkungan hidup

Secara umum, Sosiologi berarti ilmu tentang sesama atau ilmu tentang masyarakat (Raho, 2016). Pada pemahaman yang terbatas pada pengertian Sosiologi secara konvensional, yakni sebagai ilmu yang murni membicarakan hubungan antar manusia tanpa memasukkan variabel lingkungan. Padahal Sosiologi memiliki kajian khusus terhadap lingkungan dan dikenal sebagai ilmu Sosiologi Lingkungan. Dalam teori Sosiologi Fungsional yang dikembangkan Parsons dan Luhmann yang mengkaji hubungan antara manusia dan lingkungan, sudah jelas bahwa lingkungan dan kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan. Manusia tidak dapat bebas mengembangkan diri tanpa menyesuaikan dengan lingkungan.

Dengan penjelasan mengenai adanya hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana Sosiolog dalam memperlakukan lingkungan?, John J. Macionis berpendapat para ilmuwan Sosiologi dapat mendeskripsikan hubungan antara lingkungan dan masyarakat

sebab masalah lingkungan tidak datang dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh manusia

Seperti yang telah diketahui, lingkungan dan sumber daya alam yang ada saat ini sedang dalam masa kritis. Bukan hanya krisis pada lingkungan fisik saja seperti tanah, udara, air, dan iklim. Namun juga krisis biologis, hal ini dapat terlihat dari kurang produktifnya lahan-lahan pertanian juga semakin punahnya tumbuh-tumbuhan dan satwa-satwa langka yang ada disekitar kita. Aneka macam perburuan hewan langka merupakan faktor utama penyebab krisis lingkungan biologis tersebut. Persalahan ini bersumber pada kebutuhan hidup ekonomis manusia yang semakin kompleks, dengan mengeksploitasi lingkungan tanpa melihat dampak dari daya dukung yang dimiliki. Berbagai permasalahan baru pun bermunculan, bencana alam menjadi kian meningkat menyisakan duka, kerugian, dan penderitaan.

Fenomena yang terjadi diatas jelas membutuhkan perhatian dari semua kalangan, baik dari pemangku kebijakan maupun masyarakat itu sendiri. Pihak-pihak yang terkait kiranya mampu memperbaiki pola pikir dan tingkah laku serta berusaha mencari solusi agar lingkungan yang telah rusak dapat diperbaiki kembali dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang masih terjaga. Tindakan-tindakan yang dimaksud dapat berupa tindakan afektif, kognitif, psikomotorik maupun tindakan yang bersifat teoritis dan

praktis sebab kerusakan yang terjadi pada alam sejatinya adalah bentuk konsekuensi dari interaksi antara manusia dan lingkungan.

Dalam pandangan Sosiologi, interaksi yang dilakukan manusia kepada alam akan membentuk sebuah kebudayaan. Manusia memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, dengan kecerdasan yang dimiliki membuat manusia menemukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara memanfaatkan alam. Tentu saja apabila alam dimanfaatkan sesuai dengan batas wajar, maka lingkungan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama.

B. Kajian Teori (Landasan Teori)

Dalam pandangan para pendiri Sosiologi seperti Durkheim, Weber dan Marx faktor sosial dan budaya di terangkan dengan menghindari faktor lingkungan sebagai sebab fenomena sosial (Susilo, 2014). Dalam hal ini, telah banyak masalah sosial yang terjadi bersumber dari hubungan yang tidak baik antara manusia dan lingkungan. Perkembangan tersebut dianggap cukup baik ketika lingkungan dikenal luas menjadi persoalan sosial yang terjadi di Amerika sejak tahun 1960 (Limbah beracun, kualitas air, dan polusi).

Dalam proses hubungan lingkungan dan manusia, menunjukkan bahwa seluruh aspek dalam kehidupan baik itu perilaku bahkan nasib manusia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungan. Ibnu Khaldun menyatakan (Yanti & Ibrahim, 2018) bahwa bentuk dari

persekutuan hidup manusia terjadi sebagai akibat dari interaksi iklim, geografi, dan ekonomi. Ketiga dari komponen lingkungan tersebut ikut menentukan corak temperamen manusia.

Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pembangunan bendungan secara besar-besaran memungkinkan terjadinya permasalahan baru dikemudian hari. Sebab lingkungan yang telah rusak dapat mendatangkan bencana baik itu bersumber pada lingkungan itu sendiri maupun karena ulah tangan-tangan manusia. Bencana yang bersumber dari reaksi alamiah alam itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak diketahui kapan akan terjadi sehingga membutuhkan kesiapan setiap saat. Namun kerusakan alam yang bersumber dari ulah manusia dapat dikurangi kemungkinannya dengan cara menjaga dan merawat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan lingkungan yang terjaga mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat. Karenanya itu, lingkungan menjadi sangat penting untuk dilestarikan dan di jaga keberadaannya agar tidak hanya memberikan manfaat diwaktu sekarang namun diwaktu yang akan datang juga. Dalam penelitian ini, melalui teori Sosiologi Lingkungan pembangunan Bendungan Karalloe akan dilihat dari aspek etika lingkungan, adakah pembangunan bendungan ini memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar atau justru berakibat buruk bagi lingkungan tersebut.

Pembangunan Bendungan Karalloe dalam prespektif Sosiologi Lingkungan dapat dijelaskan dalam beberapa landasan teori dibawah ini :

1. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan (kota, laha, masyarakat, bisnis, dan lain-lain) yang memiliki prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi dimasa yang akan datang. Sebagaimana pernyataan Brundtland Report dari PBB bahwa salah-satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terstruktur dan terencana yang terdapat eksploitasi sumber daya alam, pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan yang antara satu dan yang lainnya memiliki keselarasan dan meningkatkan potensi masa sekarang dan masa depan untuk pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan harus fokus pada pemberantasan kemiskinan (ekonomi), perimbangan (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (lingkungan). Berdasarkan fokus

tersebut, maka secara sadar harus diusahakan investasi dalam modal ekonomi seperti modal mesin, modal sosial seperti pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial, serta modal lingkungan seperti sumber daya alam diperbaharui dan daur ulang serta substitusi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Secara fungsi, bendungan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang, seperti menanggulangi banjir karena luapan air sungai, danau, laut, waduk dan segala hal lainnya yang dapat menggenangi daratan (Simatupang et al., 2020). Mengingat musim hujan di Indonesia terjadi selama kurang lebih enam bulan lamanya dalam setahun (Ferijal et al., 2021) yang berpotensi terjadinya banjir. Dalam pembangunan bendungan Karalloe juga dirancang sebagai bangunan dengan kemampuan menampung air dalam jumlah banyak yang nantinya akan dimanfaatkan dalam bidang agraris. Perkebunan dan persawahan masyarakat sekitar Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto akan terairi meski sedang musim kemarau, sehingga panen dapat dilakukan tiga sampai empat kali dalam setahun.

Tentu saja melalui hal tersebut, bila mana dalam beroperasi bendungan fokus pada manfaat utama tanpa mengenyampingkan masalah lingkungan, maka manfaat tersebut akan berlanjut hingga dimasa generasi yang akan datang. Dalam hal ini berkesinambungan terhadap teori pembangunan berkelanjutan

(*Sustanaible Development*). Konsep *Sustainable Development* atau disebut pembangunan berkelanjutan memberikan pandangan mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar generasi selanjutnya dapat merasakan dan menikmati pembangunan tanpa mengompromikan kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Kurnia et al., 2019).

Berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, sebuah bendungan yang bertujuan pada manfaat jangka panjang harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat (Maria Lawalata, 2013).

Uraian masing-masing aspek seperti aspek ekonomi dapat dilihat pada pemanfaatan sumber air sebagai cadangan pengairan bagi perkebunan dan persawahan daerah sekitar, dengan begitu dari aspek sosial dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seperti mengembangkan rasa memelihara dan kemampuan beradaptasi terhadap hal yang baru juga terbentuk, aspek ekonomi dan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila aspek lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pembangunan Bendungan Karalloe dengan pemanfaatan lingkungan sekitar tanpa adanya keinginan untuk menguras habis sehingga berpotensi rusak dan merugikan diwaktu yang akan

datang. Dapat disimpulkan faktor yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengesampingkan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam proses pembangunan bendungan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaan harus dilakukan dalam batas wajar sehingga tidak merusak lingkungan dan merugikan generasi selanjutnya. Namun, dengan adanya pembangunan yang telah dilakukan dan berbagai fasilitas yang telah ada sebelumnya generasi selanjutnya bukan berarti dapat berleha-leha dan bermanja-manja namun menuangkan ide kreatif dalam pengembangan sumber daya alam dan pembangunan.

2. Teori Modernisasi

Walt Whitman Rostow mengatakan modernisasi merupakan proses secara bertahap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat, diawali pada masa primitif yang sederhana menuju tatanan kehidupan masyarakat yang maju dan kompleks (Yanti & Ibrahim, 2018). Daniel Lerner juga menjelaskan aspek dasar modernisasi yaitu, urbanisasi, industrialisasi, sekularisasi, demokratisasi, pendidikan, serta peran media massa yang secara keseluruhan berlangsung dengan keterkaitan yang utuh, tak terpisahkan, dan juga tidak serampangan yang membuat Weber

menyebut bahwa modernisasi sebagai proyek negara besar pada dunia ketiga.

Dalam proses pembangunan, teori modernisasi merupakan teori yang sangat dominan untuk menentukan arah pembangunan. Adapun dua teori yang mendukung teori modernisasi yaitu, teori fungsional dan teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear yang artinya terus maju secara perlahan membawa manusia dari masa primitif menuju masa modern. Tatanan kehidupan masyarakat modern dibawah kendali ilmu, teknologi, dan pemikiran rasional, hal ini dapat menjadi baik apabila manusia memiliki kapabilitas untuk menuruti tuntutan-tuntutan dari modernisasi. Dalam artian, modernisasi sebagai kekuatan dominatif yang tidak dapat ditolak maupun dilawan.

Dalam kajian yang akan dilakukan, Pembangunan bendungan merupakan satu dari begitu banyaknya gejala-gejala modernisasi. Ketepatan dan kemampuan para pemikir dalam menciptakan sebuah bangunan kokoh dan megah dengan berbagai fungsi yang ditawarkan. Ketepatan design bangunan dalam memaksimalkan fungsi dapat dilihat dalam kemampuan bendungan mengendalikan banjir dan penyediaan air untuk saluran irigasi. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan Bendungan Karalloe telah memunculkan masalah baru. Dengan mengalif fungsikan pemukiman masyarakat sekitar dan perkebunan

para petani dengan dalih ganti rugi, daerah sekitar Sungai Kelara diperluas dengan cara pepohonan ditebang, bukit dan tebing digunduli mengakibatkan suhu menjadi kian panas dan kemungkinan terjadi longsor dikemudian hari menjadi meningkat, biota-biota laut sedikit demi sedikit kehilangan habitat aslinya, masyarakat sekitar yang semula bisa memanfaatkan sungai sebagai tempat memancing kini begitu terbatas. Semua hal tersebut merupakan bagian dari *The Risk Society* sebagai dampak dari modernisasi.

Pembangunan Bendungan Karalloe tidak bisa ditolak oleh masyarakat, yang dapat dilakukan adalah mengikuti alur dan memanfaatkan kembali keberadaan bendungan seperti membuat UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), misalnya menjual makanan dan minuman. Hal ini menjadi peluang sebab disekitar bendungan tak jarang banyak masyarakat berkunjung dan mengabadikan moment menggunakan kamera *handphone*, atau sekedar melihat arsitektur dari bendungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Simmel mengatakan modernitas terutama terjadi dalam dua situs utama yang memiliki hubungan satu sama lain yaitu kota dan ekonomi uang (Ermawati et al., 2020).

Selain membuat UMKM, masyarakat sekitar juga menjadi buruh bangunan dan mendapat upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga dalam kehidupan modern dikenal dengan

pembagian kerja seperti tesis yang dibuat oleh Durkheim mengenai pengaruh modernisasi terhadap loyalitas geografis lokal yang kian berkurang akibat munculnya pekerjaan baru berdasarkan pembagian kerja (Urry & Novenanto, 2017). Yang dilakukan oleh masyarakat tentu menjadi pilihan yang harus dilakukan demi keberlangsungan hidup ditengah perkembangan yang terjadi.

Teori modernisasi menjelaskan tentang semangat pembangunan yang mengubah masyarakat dari era tradisional menuju masyarakat yang maju atau modern. Dapat dilihat pada aspek nilai, budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat negara-negara berkembang. Sehingga dalam hal ini, modernisasi selalu menjadi ukuran kemajuan masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Bendungan Karalloe terbentang luas diatas permukaan air sungai Kelara Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, dengan design bangunan yang difungsikan untuk menunjang kesejahteraan sebagian masyarakat Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto. Sekitar Bendungan Karalloe merupakan pemukiman warga dengan berbagai latar belakang yang ada, ada yang bekerja sebagai petani, buruh bangunan, wiraswasta dan sebagainya.

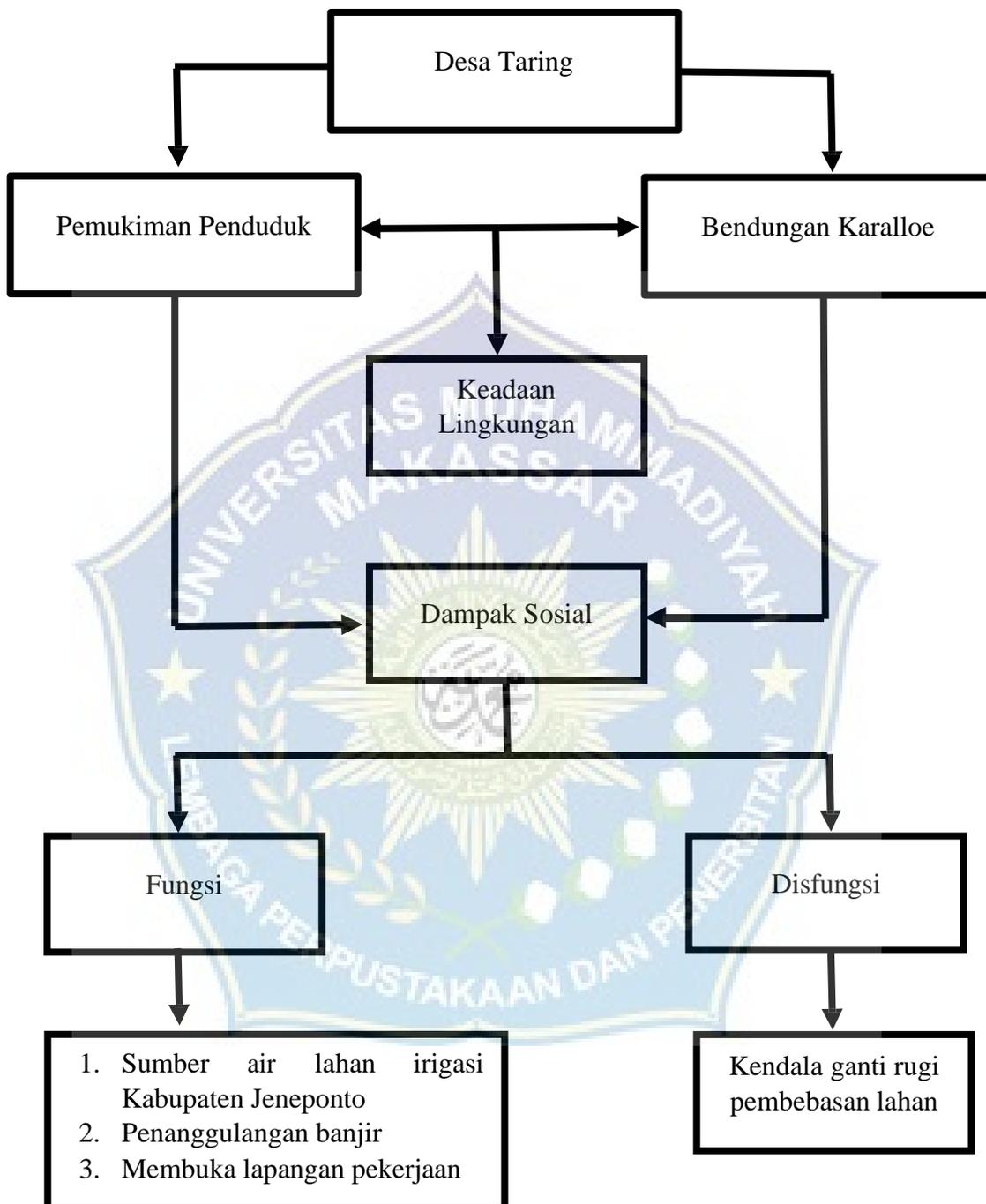
Adapun tujuan pembangunan Bendungan Karalloe sebagai wadah ditampungnya air dalam jumlah yang banyak sehingga dapat lebih

berguna bagi kehidupan masyarakat. Seperti sumber air bersih, cadangan air untuk irigasi, menghindari terjadinya banjir, dan sebagainya. Namun, dengan pembangunan bendungan yang ada menjadikan habitat biota-biota sungai menjadi terganggu, selain itu lingkungan sekitar menjadi panas karena ditebangnya pohon-pohon yang menghalangi pengerjaan bendungan tersebut. Akibatnya, udara yang dihasilkan pun menjadi kurang bersih.

Berdasarkan pada apa yang terjadi, hal tersebut bila dilihat dari kajian *enviromental ethics* menggambarkan eksploitasi lingkungan dan dapat berakibat pada manfaat lingkungan kedepannya. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teori *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan). Selain hal tersebut, nyatanya wilayah yang dijadikan sebagai area Bendungan Karalloe merupakan daerah perkebunan yang dimiliki masyarakat sekitar, sehingga tempat mata pencaharian masyarakat sekitar menjadi hilang.

Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Dengan dibangunnya bendungan Karalloe maka dapat memberikan manfaat bagi manusia seperti dapat menanggulangi banjir, sawah-sawah masyarakat yang terairi oleh bendungan ini dapat panen hingga 3 kali dalam setahun. Namun dibalik itu, ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan yakni dari sisi *Enviromental Ethics* (etika lingkungan).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anantha Prtama, Risca Evia Nuraini, dan Yulita Firdausi dengan judul penelitian “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Lingkungan (Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang di Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan untuk memereatakan pembangunan bagi semua generasi baik generasi yang telah ada saat ini maupun yang akan datang. Melalui konsep tersebut, Wisata Alam Gondak tidak didapati tanda-tanda telah melanggar kriteria dalam pemabngunan, sehingga dianggap baik bagi keberlangsungan pembangunan. (Prathama et al., 2020). Hal ini membuat peneliti ingin melihat bagaimana pembangunan berkelanjutan pada Bendungan Karalloe, apakah menimbulkan dampak kerusakan sehingga berpotensi bagi masa depan generasi selanjutnya atau tidak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhar Junef dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. Adapun dalam penelitian ini di temukan penegakan hukum dalam penataan ruang dan tempat di Indonesia merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebab hal ini menjadi satu penentu dalam pembangunan

berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan dapat terjadi bila mana ada keselarasan antara lingkungan alami dan lingkungan buatan, serta adanya harmonisasi terhadap penggunaan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Serta harus dilakukannya perlindungan terhadap fungsi ruang juga pencegahan dampak negatif bagi lingkungan bersumber dari pemanfaatan ruang secara besar-besaran (Muhar, 2017). Hal ini membuat peneliti juga ingin melakukan analisis terhadap pembangunan Bendungan Karalloe ditinjau pada aspek pemanfaatan sumber daya alam dalam batas wajar

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jazuli dengan judul “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan” . Berdasarkan pada penelitian ini menemukan bahwa masih banyak terjadi kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan disebabkan kebijakan memanfaatkan sumber daya alam yang mengarah pada sentralistik dan sektoral. Pemanfaatan lingkungan secara besar-besaran berpotensi pada kerusakan dimasa yang akan datang (Jazuli, 2015). Sehingga peneliti ingin melakukan analisis pada Bendungan Karalloe terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan dalam proses pembangunan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Rosana dengan judul “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di

Indonesia". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap lingkungan. Jika dalam sebuah pembangunan tidak bermanfaat bagi kelestarian lingkungan artinya pembangunan tersebut telah mengeksploitasi lingkungan secara tidak wajar (Rosana, 2018).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang fokus mengkaji serta menganalisis keberadaan Bendungan Karalloe di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dalam tinjauan *enviromental ethics*. Hal ini berkesinambungan pada harapan untuk mengfungsikan metode penelitian kualitatif dalam memecahkan masalah secara tepat sehingga mampu menghasilkan data-data konkret terkait fokus utama dalam penelitian. Sebagaimana Creswel (2003) menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi serta memahami makna-makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari permasalahan sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dengan karakteristik geografisnya merupakan dataran tinggi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan namun terlebih dahulu peneliti menjelaskan waktu pelaksanaan

penelitian, selanjutnya peneliti membuat tabel jadwal penelitian dengan format sebagai berikut :

No	Jeneis kegiatan	Bulan							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Mei
1.	Pengajuan Judul	✓							
2.	Penyusunan Proposal	✓	✓						
3.	Konsultasi Pembimbing		✓	✓					
4.	Seminar Proposal			✓					
5.	Pengurusan Izin Penelitian			✓	✓				
6.	Penelitian					✓	✓		
7.	Seminar Hasil								✓

C. Instrument Penelitian

1. Catatan lapangan

Catatan lapangan digunakan oleh peneliti untuk memetakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian secara terstruktur, olehnya itu dalam penelitian ini peneliti membuat lembar observasi sebagai pedoman dan bukti akurat selama melaksanakan penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan Denzin dan Lincoln bahwa observasi

dalam penelitian kualitatif haruslah menggunakan berbagai metode dan alat sehingga mampu menafsirkan dan menganalisis suatu fenomena yang terjadi (Sidiq et al., 2019).

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti sebagai panduan untuk membantu mengarahkan pembicaraan ketopik penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan Mason bahwa istilah wawancara kualitatif biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada bentuk wawancara yang mendalam, semi terstruktur atau terstruktur secara longgar (Rosaliza, 2015). Pedoman wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Fungsi pedoman wawancara yaitu untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan informasi yang akurat dan lengkap terkait permasalahan yang sedang diteliti.

3. Alat Perekam

Alat perekam digunakan dalam melengkapi catatan-catatan wawancara dengan cara merekam suara maupun video mengenai seluruh paparan atau informasi yang diperoleh dalam penelitian.

4. Peneliti Itu sendiri

Peneliti itu sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini karena peneliti yang membuat, menggali data, menelaah dan menafsirkan.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*, sehingga informasi dalam penelitian ini dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin guna merinci data yang ada dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Neuman menunjukkan bahwa pengambilan sampel bola salju adalah teknik multistage. Ini dimulai dengan satu atau beberapa orang atau kasus dan menyebar berdasarkan tautan ke kasus awal. Semakin besar bola salju yang menggelinding, semakin besar pula jumlah peserta yang dipilih untuk penelitian (Lenaini, 2021). Hal yang sama juga disampaikan oleh Gleshne dan Peshkin yang mengatakan seorang peneliti yang hendak menggunakan teknik *snowball sampling* harus melakukan kontak awal kepada informan (menggunakan bola salju pertama) kemudian informan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk informan selanjutnya (Mohd Ishak & Abu Bakar, 2014).

E. Jenis Data

Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pada pengelompokannya;

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 1999). Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan pedoman wawancara yang di wawancarakan kepada informan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yang bersumber dari dokumentasi berupa buku, jurnal, blog web dan arsip yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari BPS maupun instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini diperuntukkan sebagai pencatat atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang di selidiki dan juga dapat diartikan sebagai pencatat atau pengamatan bebas. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Sutrisno Hadi bahwa observasi

adalah suatu proses yang kompleks dan suatu proses yang secara tersusun dari berbagai aspek biologis maupun psikologis (Agustiani, 2018).

2. Wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai proses untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar rumusan masalah kepada informan penelitian. Hal ini seiring dengan pernyataan Esterberg yang mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Agustiani, 2018). Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
3. Dokumentasi yang digunakan sebagai teknik untuk memperoleh data-data dari peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menentukan data yang diperoleh dalam proses penelitian merupakan data yang akurat secara terstruktur sebagaimana

Neong Muhadjir menyatakan analisis data merupakan upaya dalam mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan pemahaman peneliti mengenai masalah/kasus yang diteliti sehingga dapat disajikan bagi orang lain sebagai temuan baru (Rijali, 2018).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat tahap yaitu :

1. Pengumpulan data, dalam tahap ini peneliti data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitian.
2. Reduksi data, yakni proses fokusasi, sederhanaan dan abstraksi data besar dari kegiatan penelitian.
3. Penyajian data, selanjutnya suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Metode data yang digunakan dalam penyajian data adalah metode deskriptif. Dalam tahap ini, hasil penelitian perlu dipadukan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.
4. Menarik kesimpulan, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh hasil pengelolaan data yang telah dilakukan.

H. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Berdasarkan penjelasan Susan Stainback triangulasi memiliki tujuan bukan untuk menentukan kebenaran tentang fenomena sosial yang sama, melainkan tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang apa pun yang sedang terjadi (Bachri, 2010).

I. Etika Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, etika penelitian berkaitan dengan cara peneliti meremuskan topik penelitian, merencanakan penelitian, mengakses data, menganalisis data dan melaporkan secara bertanggung jawab dan bermoral (Sauders, Lewis dan Thornhill 2007 dalam Sarosa, 2012). Masalah etika dalam penelitian kualitatif sering kali lebih halus dari pada survey atau masalah-masalah dalam penelitian eksperimental. Isu-isu ini berhubungan dengan karakteristik metodologi kualitatif atau bidang yang biasa mencakup jangka panjang dan menutup keterlibatan pribadi, wawancara dan observasi partisipan. Penelitian lapangan adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada interaksi manusia, bukan dari satu dipandang sebagai di luar interaksi manusia.

1. Hal-hal penting dalam penelitian yaitu:
 - a. Kepribadian penelitian
 - b. Lingkungan geografis
 - c. Sifat objek penelitian

- d. Latar belakang kelembagaan peneliti
 - e. Para pemegang kunci
 - f. Status para pelaku tugas lapangan
 - g. Ekspektasi dalam penelitian
 - h. Factor-faktor lain yang mempengaruhi penelitian dilapangan
 - i. Publikasi
 - j. Tanggung jawab sosial dan moral.
2. Etika dalam penelitian
 - a. Menjalin hubungan ke dalam hubungan kerjasama dan kolaborasi berkomitmen
 - b. Adanya izin/persetujuan yang benar dilakukan sesuai dan kebutuhan privasi kerahasiaannya. (keberadaan subyek yang diteliti, identitas)
 - c. Bersikap terbuka, langsung dan jujur.
 - d. Menghormat hak asasi informan
 - e. Pembiayaan dana riset benar di lakukan sesuai proposal
 3. Cakupan penting etika
 - a. Integrasi personal
 - b. Perhatian informan
 - c. Tanggung jawab
 - d. Hubungan peneliti dengan sponsor
 4. Ada beberapa isu pokok etika dalam penelitian
 - a. Beneficence : kewajiban untuk menyeibangkan antara keuntungan dan resiko yang harus di tanggung
 - b. Non-malefienc : kewajiban untuk menghindari hal-hal atau akibat yang tidak menyenangkan
 - c. Menghargai otonomi subyek
 - d. Keadilan : fairness bagi subyek

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Gowa Sebagai Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Gowa berada di kota Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu. Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3.01% dari keseluruhan luas di Sulawesi Selatan dan berpenduduk ± 652.941 jiwa.

Bahasa yang digunakan di Kabupaten Gowa adalah bahasa Makassar dengan Suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk kabupaten ini mayoritas beragama Islam.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi menjadi 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa Sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Parangloe
2. Kecamatan Parigi
3. Kecamatan Manuju
4. Kecamatan Tinggimoncong
5. Kecamatan Tombolo Pao

6. Kecamatan Bungaya
7. Kecamatan Bontolempangan
8. Kecamatan Tompobulu
9. Kecamatan Biringbulu

Selebihnya 27,74 % berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni :

1. Kecamatan Somba Opu
2. Kecamatan Bontomarannu
3. Kecamatan Pattalassang
4. Kecamatan Pallangga
5. Kecamatan Barombong
6. Kecamatan Bajeng
7. Kecamatan Bajeng Barat
8. Kecamatan Bontonompo
9. Kecamatan Bontonompo Selatan

Sebelum Kabupaten Gowa terbentuk, terdapat 9 Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan raja kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya Bersama Raja-raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan Sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar *Karaeng Sombaya Ri Gowa*.

Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdian), kemudian lembaga ini berubah menjadi *Bate Salapang* (Sembilan Pemegang Bendera)

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut *Kasuwiyang-kasuwiyang* dan merupakan kerajaan kecil yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyang, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je;ne, Bisei, Kalling, dan Sero.

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa'risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje'ne), Sidenrang, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh daratan Sulawesi Selatan.

Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa'risi Kallonna tersebutlah nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan akasara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo.

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandangmenyebarkan agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabria menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan salata Jumat untuk pertama kalinya.

Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan kerajaan maritime yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur.

Pada tahun 1653-1670 kebebasan berdagang di laut leps masih menjadi garis kebijaksanaan Gowa dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Hal tersebut mendapat tantangan dari VOC yang memicu perseteruan dan konflik yang mencapai puncak saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton.

Peperangan yang terjadi antara kerajaan Gowa dan VOC yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan kerugian antara keduanya, oleh Sultan Hasanuddin dengan adanya pertimbangan kearifan dan kemanusiaan untuk menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC.

Tepat pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian ini tidak berjalan dengan baik sebab pada tanggal 9 Maret 1668, pihak kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa Kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat.

Sultan Hasanuddi bersumpah tidak akan bekerja sama dengan Belanda dan tepatnya pada tanggal 1 Juni 1669 diangkat sebagai Raja Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat di usia 36 tahun. Berkat perjuangannya terhadap bangsa dan negara maka dengan surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 November 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

Kerajaan Gowa telah mengalami sebanyak 36 kali mengalami pergantian Somba (raja) sebagaimana terlihat pada table berikut :

No	Nama Raja	Periode
1.	Tumanurung Bainea (Putri Ratu)	-
2.	Tamasalangga Baraya	1320-1345
3.	I Puang Loe Lembang	1345-1370
4.	I Tuniata Banri	1370-1395
5.	Karampang Ri Gowa	1395-1420
6.	Tunatangka Lopi	1420-1445
7.	Batara Gowa Tuniawangngan	1445-1460
8.	Ipakereo Tau Tunijallo Ri Passuki	1460
9.	Dg. Matanre Krg. Mangnguntungi Tumapa'risi Kallonna	1460-1510
10.	I Manriwagua Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng	1510-1546
11.	I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data' Tunibatta	1546-1565
12.	I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo	1565 (40 hari)
13.	I Tepu Karaeng Daeng Parabbu Karaeng Bontolangkasa Tunipassulu Tumenanga Ributung	1565-1590
14.	I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga Ri Gaukanna	1590-1593

15.	I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna	1593-1639
16.	I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng Bontomangape Sultan Hasnuddin Tumenanga Ri Ballapangka	1639-1653
17.	I Mappasomba Daeng Nguranga Karaeng Lakiung Sultan Amir Hamzah Tumamalianga Ri Allu	1653-1669
18.	I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bise Sultan Muhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara	1669-1674
19.	I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro Bone Sultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung	1674-1677
20.	La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng Ana' Moncong Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu	1677-1709
21.	I Mappau'rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenanga Ri Passiringanna	1709-1711
22.	I Manrabria Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin Tumenanga Ri Jawaya	1711-1724

23.	I Mappau'rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenanga Ri Passiringanna (Kedua kalinya)	1724-1729
24.	I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al Mansyur Tumenanga Ri Gowa	1729-1735
25.	I Mappababbasa Sultan Abdul Kudus Tumenanga Ri Bontoparang	1735-1742
26.	Awas Madina 'Batara Gowa II Sultan Usman (diasingkan ke Sailon oleh Belanda)	1742-1753
27.	I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang Sultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang	1753-1767
28.	I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin Tumenanga Ri Mattoanging	1767-1769
29.	I Mannawarri / I Sumaele Kareng Bontolangkasa Sultan Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjaya	1769-1778
30.	I MMappatunru / I Manginyarang Krg Lembangparang Sultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka	1778-1810

31.	La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sulltan Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril Mu'minin Tumenanga Ri Suangga	1825-1826
32.	I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan Abdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna	1826-1893
33.	I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Muhammad Idris Tumenanga Rikala'biranna	1893-1895
34.	I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembnagparang Sultan Muhammad Husain Tumenanga Ri Bundu'na	1895-1906
35.	I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga Tumenaga Ri Sungguminasa	1906-1946
36.	Andi Idjo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya	1946-1957

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swarapja dari 30 daerah Swrapja

lainnya dalam pembentukan 13 daerah Indonesia Bagian Timur. Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi Sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 dan Undang-undang Darurat NOMOR 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar.

Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya Kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah tingkat II. Kemudian selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1958 sebagai bentuk penjabaran Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk operasionalnya dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Februari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang Sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 Daerah Bawahan Distrik yang dibagi dalam 4

lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Oattalassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa.
- b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distri Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolo Pao. Koordinatornya berkedudukan di Malino.
- c. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di Seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi kecamatan. Untuk Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo
- b. Kecamatan Panakkukang dari Distri Pattalassang
- c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung
- d. Kecamatan Pallangga dari Distri Limbung
- e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo
- f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao
- g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji
- h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai ibu kota provinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan Sebagian Kecamatan Tamalatea dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.

Terjadinya penyerahan Sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah kabupaten Gowa pada masa lalu, khususnya pada di daerah kealautan di Barombong dan sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan Gowa justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang jaya di Indonesia Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara.

Dengan terlaksananya Undang-undang Nomor 51 tahun 1971, maka secara langsung wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 Kecamatan dengan 46 Desa.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka Pemerintah Daerah kabupaten Gowa berupaya menempuh kebijakan-kebijakan yang didukung oleh Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan No. 574/XI.1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di definifkan sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9.

Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah Kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 Kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Bupati Kabupaten Gowa dari tahun 1957 sampai sekarang :

1. Andi Idjo Karaeng Lalolang (1957-1960)
2. Andi Tau (1960-1967)
3. H. M. Yasin Limpo (Karetaker)
4. Andi Bachtiar (Karetaker)
5. K. S. Mas'ud (1967-1976)
6. H. Muhammad Arif Sirajuddin (1976-1960)
7. H. A. Kadir Dalle (1984-1989)
8. H. A. Azis Umar (1989-1994)
9. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si. (1994-2002)
10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si. (2002-2004)
11. H. Andi Baso Machmud (Karetaker)

12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH. (2005-2015)

13. Adna Purichta Ichsan SH, MH (2015 sampai sekarang)

2. Kondisi Geografis dan Iklim

Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Wilayah-wilayah perbatasan Kabupaten Gowa yaitu :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng

Seperti halnya dengan daerah lain yang ada di Indonesia, terdapat dua musim yang ada di Kabupaten Gowa, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan Desember hingga Maret. Keadaan ini berarti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan April-Mei dan Oktober-November.

Curah hujan di Kabupaten Gowa dipengaruhi keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran /pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam. Catatan curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada bulan Januari yang mencapai rata-rata 710 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli-September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

3. Topografi, Geologi dan Hidrologi

a. Topografi

Wilayah Kabupaten Gowa Sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yang sekitar 72,26 % ada 8 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompo Bulu dan Biring Bulu. Kondisi topografi atau ketinggian tempat di Kabupaten Gowa cukup bervariasi antara 0 sampai diatas 1000 meter dari permukaan laut (mdpl).

Berdasarkan data kemiringan lereng yang diperoleh, Kabupaten Gowa memiliki kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari daerah landai bergelombang dan sangat curam. Beberapa wilayah Kecamatan dengan kategori sangat curam adalah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Daerah Kabupaten Gowa memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) Je'ne Berang yang

merupakan sungai terbesar di Kabupaten Gowa. Dengan aliran sungai sepanjang 90 Km dan luas aliran sungai sekitar 881 Km. Untuk memaksimalkan daerah aliran sungai Je'ne Berang maka dibuat DAM Bili-bili, yang berfungsi sebagai daerah penyalur aliran air sehingga pemanfaatan air sungai Je'ne Berang dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat.

Daerah aliran sungai (DAS) antara lain adalah Je'netallasa, Pa'bundukang, Malino, Cadika, Pallappakang. Anak sungai-sungai ini berlanjut kesu ngai yang akhirnya bermuara ke Samudra Indonesia ataupun Selat Makassar.

b. Geologi

Struktur geologi batuan Kabupaten Gowa yang memiliki karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yhang dapat ditemukan di Kabupaten Gowa antara lain :

1. Batuan epiklasik gunung api (batu pasi andesitan, batu lanua, konglomerat dan breksi)
2. Batu gamping kelabu hingga putih berupa lensa-lensa besar
3. Batu gamping terumbu
4. Batu pasar hijau, grewake, napal, batulempung dan tuf, sisipan lava bersisipan andesit-basal.

5. Batupasir,, konglomerat, tufa, batulanau, batulempung, batugamping, napal.
6. Batusabak, kuarsit, filit, batupasir kuarsa malih, batulanau malih dan pualam setempat batulempung malih.
7. Granit, granodiorite, riolit, diorite dan aplit.
8. Hasil erupsi parasite
9. Konglomerat, sedikit batupasir glokonit dan serpih
10. Lava andersit dan basal, dan latit kuarsa
11. Lava, breksi, tufa, konglomerat
12. Napal deselingi batulanau gampingan dan batupasir gampingan
13. Napal, kalkarenit, batugamping koral bersisipan dengan tuf dan batupasir, setempat dengan konglomerat
14. Sepih coklat kemerahan, serpih napalan kelabu, batugamping, batupasir kuarsa, konglomerat, batugamping dan setempat batubara.

Struktur geologi sangat mempengaruhi pola penyebaran batuan dan ketersediaan bahan galian.

c. Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Gowa umumnya dipengaruhi oleh sumber air dari Sungai Saddang dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Hulu sungai Saddang yang merupakan sungai tepanjang di Sulawesi Selatan

merupakan satu Daerah aliran Sungai (DAS) Je'ne Berang berada di Kabupaten Gowa merupakan sumber air bersih dan pertanian di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya arum jerang dan wisata rafting.

Kondisi hidrologi Kabupaten Gowa secara umum adalah sebagai berikut :

1. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
2. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

4. Kondisi Demografis

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 652.941 jiwa. Pada tahun 2011 bertambah 659.513 jiwa atau sebesar 5,45 %.

Sedangkan untuk jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan struktur umur tahun 2011, kelompok umur 5-9 tahun yang terbanyak dengan jumlah 69.707 jiwa dan kelompok umur 60-64 tahun dengan jumlah 7.605 jiwa.

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2007 berjumlah 594.423 jiwa menjadi 659.513 jiwa pada tahun 2011 yang tersebar di 18 Kecamatan, dengan laju pertumbuhan sebesar 2.10 % pertahun selama periode 2007-2011.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan selama periode 2010-2011, Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya yaitu 6.50 % pertahun. Hal ini disebabkan banyak tumbuh pemukiman baru baik yang dibangun oleh swasta/developer maupun yang dibangun secara perorangan, kemudian menyusul Kecamatan Pallangga dengan tingkat pertumbuhan 4.83 % pertahun.

5. Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

Desa Taring merupakan salah satu desa yang berada dibagian tenggara Kecamatan Biringbulu berbatasan langsung dengan Kelurahan Tolo' Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Letak Desa Taring yang strategis membuat Desa Taring menjadi akses transportasi darat dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, terlebih bagi Kabupaten Jeneponto.

Adapun Desa Taring merupakan daerah yang paling luas diantara beberapa desa yang ada di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Terdiri dari sebelas Dusun yang ada di Desa Taring yaitu Dusun Ulu, Dusun Bulassi, Dusun Bontomanai, Dusun Sapabalang, Dusun Rajayya, Dusun Bangkala, Dusun Pataung,

Dusun Kampungparang, Dusun Pangngampusang, Dusun Pannyawakkang Selatan dan Dusun Pannyawakkang Utara.

Desa Taring juga merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Gowa dengan jumlah penduduk sebanyak <6.000 jiwa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lingkungan Masyarakat Terhadap Keberadaan Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan *Environmental Ethics*

Keberadaan Bendungan Karalloe dengan keindahan bangunan dan gaya arsitektur menghadirkan suasana yang berbeda dirasakan oleh masyarakat. Sebelum bendungan Karalloe dibangun, lingkungan daerah sekitar didominasi oleh pemukiman warga dengan model rumah panggung, dan perkebunan-perkebunan milik warga dengan jenis tanaman beranekaragam seperti jagung, cabai, kacang hijau, kacang tanah, dan berbagai tumbuhan lainnya.

Berdasarkan penuturan salah seorang informan yang merupakan masyarakat Dusun Rajayya mengatakan :

“Dilokasi bendungan dulu itu kebun-kebun milik warga, ada yang tanam jagung ada juga yang tanam cabai atau kacang-kacangan”. (WW/ABD/PN/L/52/23).

Daerah setempat juga dipenuhi oleh pepohonan rindang dengan jenis yang berbeda-beda, memberikan suasana sejuk dan udara yang segar. Kondisi lingkungan tersebut tentu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, namun dibalik hal itu juga cenderung memiliki kekhawatiran mengingat Sungai Kelara merupakan salah satu sungai terpanjang yang menghubungkan

beberapa daerah yang ada di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto.

“Kalau musim hujan itu orang-orang di Jeneponto selalumi menelpon kesini bertanya bagaimana sungai disana? Besarki?”(WW/ABD/PN/L/52/23).

Menurut penuturan salah seorang masyarakat Dusun Rajayya, terjadi kekhawatiran bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto dan penduduk sekitar sungai Kelara apabila musim hujan telah tiba dengan intensitas curah hujan yang secara terus menerus melanda daerah tersebut membuat sungai meluap dan terjadi banjir yang bisa menghanyutkan rumah dan harta benda lainnya.

Dengan keberadaan Bendungan Karalloe menghadirkan solusi bagi permasalahan tersebut, dengan kemampuan bendungan untuk menampung bibit air yang meningkat akibat curah hujan tinggi mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Bendungan Karalloe merupakan ekosistem buatan yang dilakukan oleh manusia dengan pembangunan yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap lingkungan, mengingat sebelum dibangun Bendungan Karalloe aliran sungai sekitar ternyata memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk keperluan mandi, mencuci pakaian, dan sebagai cadangan kebutuhan air di rumah.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu informan yang berasal dari Dusun Rajayya mengatakan :

“Sungai dibelakang rumah itu orang pakai biasa mandi, mencuci baju, bahkan ada juga yang ambil air untuk kebutuhan sehari-hari”(WW/KDJ/IRT/P/27/23).

Manfaat sungai Kelara sebelum dibangunnya bendungan Karalloe juga dijadikan sebagai tempat pemancingan berbagai jenis biota sungai yang hidup didalamnya seperti ikan, udang, kepiting, belut, dan lain-lain. Namun, dengan pembangunan bendungan tersebut, kegiatan yang semula sering dilakukan masyarakat sekitar menjadi berkurang. Kondisi ini berlangsung selama proses pembangunan Bendungan Karalloe.

“orang tidak bisa pergi memancing karena banyak pekerja, banyak juga mobil berat dan alat-alat lain. Jadi susah memancing, ikan-ikan juga berkurang karena ada perluasan sungai dan pengerutan dasar sungai”

Seiring berjalannya waktu, keberadaan bendungan Karalloe perlahan menciptakan ekosistem yang cocok bagi populasi jenis ikan yang ada di Sungai Kelara.

“Sekarang justru ditenak ikan disungai, apalagi yang di Dusun Bangkeng Ta'bing karena itu sungai pas dibelakang rumah jadi dekat bisa kapan saja diambil”

Usaha untuk melestarikan dan mengembang biakkan ikan pada aliran sungai Kelara dilakukan usai selesainya pembangunan Bendungan Karalloe. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan populasi ikan sehingga masyarakat sekitar dapat menikmati hasilnya. Jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan nila, ikan mujair,

ikan lele, dan lain-lain dengan sistem budidaya bebas tanpa diberikan makanan namun tetap berkembang.

Aadapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Bendungan Karalloe dengan melibatkan lingkungan yaitu :

a. Pembebasan lahan Dusun Pa'lopiang

Sebelum bendungan Karalloe didirikan, terdapat salah satu dusun yang bermukim disekitar sungai Kelara. Daerah tersebut bernama Dusun Pa'lopiang, dengan penduduk mayoritas bekerja sebagai petani jagung dan tanaman jangka panjang seperti jambu mente atau yang sering disebut jambu monyet. Selain bertani, masyarakat juga memanfaatkan sungai Kelara untuk mencari ikan lalu menjual ke pasar setempat. Hal ini sebagai upaya menambah pemasukan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari.

"Dulu ada dusun bernama Pa'lopiang yang ada disebelah sungai berdekatan dengan dusun Bangkeng Ta'bing, tapi karena akan dibangun Bendungan Karalloe suka tidak suka mau tidak mau mereka harus rela dipindahkan ke tempat yang lain". (WW/ABD/PN/L/52/23).

Sejak awal rencana dibangunnya bendungan Karalloe pada tahun 2013 menjadi permasalahan bagi masyarakat Dusun Pa'lopiang tersebut, penduduk setempat keberatan melepas lahan mereka untuk dibangun bendungan. Permasalahan ini kemudian menjadi masalah serius yang dihadapi pengelola dan

pemerintah sehingga pembangunan bendungan Karalloe menjadi mundur dari perencanaan sebelumnya.

“Awal pembangunan bendungan sebenarnya pada tahun 2013, namun sempat mengalami kendala yaitu banyak masyarakat yang tidak ingin menyerahkan tanah milik mereka untuk dibangun bendungan. Sehingga bendungan dapat maksimal pengerjaannya pada tahun 2016 hingga resmi dibuka oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021”(WW/HR/PG/L/32/23).

Usaha untuk meyakinkan masyarakat setempat mengenai pembebasan lahan gencar dilakukan oleh pihak pengelola dan pemerintah. Dengan janji ganti rugi yang sesuai dengan luas dan isi dari lahan yang masyarakat miliki menjadi upaya yang paling berhasil.

“Sebetulnya banyak masyarakat yang tidak setuju, akan tetapi karena sudah menjadi keputusan pemerintah maka kita hanya bisa mengikuti saja”(WW/KD/IRT/P/27/23).

Berdasarkan penuturan informan tersebut, banyak masyarakat yang tidak setuju apabila pembangunan bendungan ini mengharuskan mereka menyerahkan tanah yang dimiliki kepada pemerintah.

“Mallakki punna lanaalleangki buttangta, apalagi punna tenaja na sesuai doek minro mange rigitte. Latamaiki angmantang”(WW//DL/IRT/P/49/23).

Maksud dari informan yang memberikan informasi tersebut yaitu : Kami takut kalau tanah kami diambil oleh pemerintah, apalagi kalau harga yang diberikan tidak sesuai, kami akan

tinggal dimana?. Ketakutan yang dirasakan masyarakat adalah dimana mereka akan tinggal dan membangun rumah. Sebab untuk memulai dan beradaptasi dengan lingkungan baru bukanlah sesuatu yang mudah.

Namun seiring berjalannya waktu, Pembebasan lahan berhasil dilakukan dengan menurunkan anggota kepolisian dan tentara nasional Indonesia, adapun dengan dalih ganti rugi tersebut membuat masyarakat mau tidak mau menyerahkan lahan mereka kepada pemerintah. Adapun mereka berpindah lokasi kebeberapa dusun yang masih berada disekitar bendungan Karalloe, seperti Dusun Rajayya dan Dusun Bangkeng Ta'bing.

“Dusun Pa’lopiang adalah daerah paling cocok untuk dialih fungsikan menjadi Bendungan Karalloe, mengingat lokasinya yang paling dekat disebang sungai dan juga lebih rendah dibanding dusun yang lain. Namun yang sangat disayangkan karena masyarakat harus berpindah lokasi pemukiman ke beberapa daerah yang lain”. (WW/AZ/KD/L/48/23)

Pembebasan lahan Dusun Pa’lopiang menjadi kawasan Bendungan Karalloe kemudian dapat berjalan sebagaimana harapan pemerintah dan pengelola. Proses pembebasan lahan dilakukan untuk membangun bendungan Karalloe mewarnai proses pembangunan bendungan. Muncul dampak positif dan negatif pada pembebasan lahan di Dusun Pa’lopiang tersebut. Dampak positif pembebasan lahan dapat dilihat pada

peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat, yakni uang ganti rugi atas kepemilikan tanah dan benda yang ada di atasnya dapat digunakan untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik dan membangun rumah yang lebih layak. Ada pula yang menggunakan uang ganti rugi tersebut sebagai modal usaha.

Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif yakni hilangnya ekosistem alami Dusun Pa'lopiang, lingkungan menjadi gersang, hilangnya lahan sawah dan perkebunan sehingga mengakibatkan pengangguran, serta sulitnya masyarakat untuk beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal yang baru.

b. Penanaman seribu pohon

Sungai Kelara yang melewati Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto yang disekelilingnya terdapat pemukiman warga, pegunungan, perkebunan dan persawahan menjadi lokasi pilihan pembangunan bendungan Karalloe yang tentu menjadi sebuah program yang membutuhkan banyak lahan dan kawasan untuk kelancaran pembangunan.

Dalam rangka kelancaran pembangunan, dilakukanlah penggundulan bukit-bukit dan penebangan pohon disekitar sungai Kelara.

“Karena membangun sebuah bendungan membutuhkan lahan luas, sehingga caranya dengan dilakukan perluasan wilayah seperti bukit-bukit sekitar diratakan yang akhirnya pepohonan pasti ditebang”. (WW/AZ/KD/L/48/23).

Perataan bukit dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti eskapator dan sebagainya, adapun penebangan pohon juga menggunakan tenaga manusia. Melihat peristiwa penggundulan bukit dan perataan tanah serta penebangan pohon sebenarnya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi penduduk sekitar, ditambah pemandangan pada saat itu yang begitu gersang dan cuaca yang sangat panas. Kondisi ini terjadi dari awal pembangunan bendungan, hingga akhirnya solusi yang dilakukan adalah penanaman pohon atau reboisasi.

“Upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar adalah penanaman seribu pohon”. (WW/HR/PG/32/L/23)

Pada peresmian bendungan Karalloe tanggal 23 November 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo juga turut memberikan berbagai jenis pohon yang nantinya akan ditanam disekitar bendungan Karalloe. Penanaman pohon selain untuk mengembalikan lingkungan sekitar menjadi hijau dan tidak gundul juga untuk memperindah lingkungan sekitar bendungan Karalloe dengan design yang menarik. Pepohonan juga nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat, sebab berbagai jenis pohon sangat diminati oleh masyarakat seperti pohon mangga, pohon jambu dan berbagi jenis pohon lainnya.

“Pohon yang ditanam ini juga bagus karena nanti kita sendiri yang akan menikmati hasilnya”(WW/ABD/PN/L/52/23).

Pohon-pohon yang ditanam dengan design yang menarik serta gaya bangunan dari bendungan Karalloe juga mendatangkan perhatian dari masyarakat luar, masyarakat dari daerah lain banyak yang datang berkunjung ke Bendungan Karalloe hanya untuk sekedar berfoto dan melihat pemandangan sekitar.

“Sebenarnya bendungan ini tidak dibuka untuk umum, karena memang bukan tempat rekreasi. Tapi kami memberikan kesempatan bagi masyarakat yang datang berkunjung karena kasihan kalau sudah datang jauh-jauh tapi tidak diizinkan masuk, hanya saja kami tidak mengizinkan kalau terlalu banyak rombongan dalam satu waktu bersamaan” (WW/HR/PG/L/32/23).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bendungan Karalloe juga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar, meskipun tidak menjadi tempat umum namun masyarakat tetap antusias berdatangan. Hal ini juga dipergunakan oleh masyarakat untuk menjadi peluang usaha, seperti menjual aneka makanan ringan maupun berat seperti berbagai jenis kue, minuman, dan makanan lainnya.

Pasca penanaman seribu pohon dengan jenis yang beraneka ragam, keadaan lingkungan sekitar bendungan Karalloe menjadi lebih baik dari pada sebelumnya, terlihat pada kondisi bukit yang semula gundul kini nampak hijau kembali, udara terasa lebih sejuk, dan pemandangan jauh lebih indah.

2. Dampak Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan Fungsi Dan Disfungsi

a. Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan Fungsi

Secara fungsi, sebuah bendungan tentu didesign dengan berbagai manfaat yang akan berguna bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Umumnya sebuah bendungan berfungsi untuk membendung air yang ada sehingga menjadi cadangan untuk berbagai keperluan masyarakat sehari-hari selain itu bendungan juga berfungsi untuk menahan banjir yang kerap terjadi di wilayah-wilayah apabila musim penghujan tiba.

Berbagai fungsi bendungan menjadi serangkaian pemikiran yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membangun bendungan disuatu daerah. Adapun beberapa fungsi keberadaan bendungan Karalloe di Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa yaitu :

1) Sumber air lahan irigasi Kabupaten Jeneponto

Daerah sekitar bendungan Karalloe dipenuhi dengan persawahan milik para petani. Keberadaan bendungan Karalloe memberikan fungsi untuk mengairi dan membantu para petani menyiram tanaman seperti jagung dan padi sehingga produksi yang dihasilkan lebih meningkat dari sebelumnya.

Menurut penuturan dari Hartono, petugas operasi bendungan Karalloe :

“Bendungan Karalloe ini mengairi sekitar 7.000 hektare daerah Kabupaten Jeneponto, jadi sebenarnya kalau di Kabupaten Gowa sendiri tidak begitu berdampak untuk bidang pertanian, melainkan untuk Kabupaten Jeneponto”(Wawancara pada tanggal 25 Maret 2023).

Keberadaan bendungan Karalloe benar adanya berlokasi di Kabupaten Gowa tepatnya di Desa Taring Kecamatan Biringbulu, namun manfaat utama dalam bidang irigasi dirasakan oleh masyarakat Jeneponto. Dengan begitu, masyarakat Kabupaten Jeneponto memiliki kemungkinan besar untuk menanam padi, jagung dan tumbuhan lainnya lebih dari dua kali dalam setahun. Hal ini dapat terjadi sebab ketersediaan air untuk kebutuhan tanaman terjaga dengan baik melalui penampungan pada bendungan Karalloe, selain itu bendungan Karalloe juga dapat mengontrol air yang masuk ke sawah dan lahan pertanian milik warga sehingga tidak kurang dan juga berlebihan yang bisa menyebabkan gagal panen.

Peningkatan jumlah panen yang dapat dilakukan oleh para petani dalam setahun tentu memberikan dampak baik baik bagi pertumbuhan masyarakat Kabupaten Jeneponto seperti yang disampaikan oleh Hj. Empo, salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Tonroa Desa

Bontomate'ne Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
yaitu :

"Kita juga bisami tanam jagung biar bukan musim hujan karena bisaki sirami kebun pake air dari bendungan"(Wawancara pada tanggal 26 Maret 2023).

2) Penanggulangan banjir

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling meresahkan masyarakat Indonesia termasuk bagi masyarakat Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto. Tak dapat dipungkiri bahwa kedua daerah ini adalah daerah langganan banjir apabila musim hujan telah tiba, tentu hal ini menjadi keresahan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang rumahnya berada disekitar sungai.

"Tahun 2018 yang lalu pernah terjadi banjir, sampai banyak sekali rumah hanyut, sapi, kuda, mobil bahkan manusia juga banyak meninggal"(Wawancara pada tanggal 25 Maret 2023).

Banjir yang terjadi pada tahun 2018 bukanlah kali pertama terjadi banjir di daerah sekitar, namun beberapa kali juga pernah terjadi ditahun sebelumnya seperti pada tahun 2011 karena intensitas hujan yang sangat lebat mengakibatkan adanya air susulan dari hulu sungai yang tidak mampu dibendung jumlahnya. Beberapa kali banjir terjadi karena penyebab yang sama, yakni meluapnya air sungai hingga menyebabkan banjir bandang dan masuk ke pemukiman warga merusak rumah dan terdapat korban jiwa.

Penuturan salah seorang masyarakat Kabupaten Jeneponto yang terdampak banjir tahun 2018, mengatakan :

“Banjir yang terjadi karena air bawaan dari sungai di bagian Kabupaten Gowa membuat saya mengalami banyak kerugian, kebetulan saya memiliki toko sembako hampir semua hanyut dan terendam air”(Wawancara pada tanggal 20 Maret 2023).

Kerugian yang terjadi serta banyaknya korban jiwa tentu menjadi sebuah permasalahan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah, bendungan Karalloe sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan kemampuan bendungan menampung air sehingga kemungkinan terjadi banjir juga kian sedikit.

3) Membuka lapangan pekerjaan

Proses pembangunan bendungan Karalloe dilaksanakan pada tahun 2013 dan sempat terkendala karena pembebasan lahan sehingga efektif kembali pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Dalam kurun waktu yang tidak sedikit tentu membutuhkan tenaga yang luar biasa pula. Pembangunan bendungan Karalloe dengan mempertimbangkan fungsi yang akan berikan kepada masyarakat membutuhkan pemikiran dan fokus yang tepat demi kelancaran pembangunan.

Berbagai hambatan terjadi dalam proses pembangunan bendungan Karalloe seperti masyarakat yang

tidak setuju lahan yang mereka miliki diserahkan dan alihkan menjadi lahan pembangunan bendungan. Namun disamping itu, pembangunan bendungan Karalloe juga mendapatkan respon baik dari sebagian besar masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak terdampak pada pembebasan lahan sebab terbuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar.

“Yang jelas masyarakat pada gembira menyambut bendungan ini, karena banyak diantara warga bisa mendapatkan peluang kerja disana, walaupun pekerja harian”(WW/ABD/PN/L/52/23).

Pekerjaan harian yang dimaksud seperti kuli bangunan yang setiap harinya akan diberikan upah atau juga bisa diberikan setiap bulan tergantung kesepakatan pekerja dan pihak bendungan. Tidak hanya pekerja harian atau kuli bangunan, banyak juga diantara masyarakat yang bekerja sebagai kariawan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

“Suami saya sebagai satpam yang menjaga keluar masuk orang yang datang”(WW/IRT/KD/26/23).

Berdasarkan penuturan salah satu istri kariawan bendungan Karalloe, menyebut bahwa pekerjaan sebagai sekuriti di bendungan Karalloe merupakan kesempatan yang sangat besar bagi keluarga mereka, dengan pekerjaan yang

tidak begitu sulit namun mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya sebetulnya tamatan SMA ji, tapi alhamdulillah saya bisa bekerja di bendungan ini, padahal dulunya saya hanya petani. Kalau gajinya ya sekitaran seratus dua puluh ribu perharinya jadi saya bisa mendapatkan tiga juta enam ratus perbulannya”.(WW/SP/R/L/28/23).

Selama bendungan Karalloe beroperasi telah banyak mempekerjakan masyarakat sekitar bukan hanya dari kaum laki-laki namun juga banyak dari kaum perempuan sebagai tukang bersih-bersih dan lain-lain. Para ibu rumah tangga juga banyak yang membuka usaha makanan untuk para kariawan bendungan Karalloe. Melalui aktivitas tersebut, ibu-ibu rumah tangga sekitar dapat membantu perekonomian keluarga.

b. Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan Disfungsi

Bendungan Karalloe telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun sejak peresmian pada tanggal 23 November 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Sejak awal pembangunan, bendungan Karalloe terkendala pada pembebasan lahan karena banyaknya masyarakat yang tidak rela memberikan hak tanah mereka kepada pemerintah dan pengelola. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan akhirnya masyarakat mau tidak mau harus rela menyerahkan lahan tersebut dengan dalih ganti rugi atas kepemilikan rumah, tanaman yang sedang bertumbuh dan sebagainya. Meski begitu, nyatanya sampai hari ini masih ada

beberapa kepala rumah tangga yang tidak memperoleh hak ganti rugi atas kepemilikan tanah tersebut.

“Sebenarnya uang ganti rugi itu sudah mau diserahkan kepada yang memiliki hak, namun masyarakat banyak dipropokatori oleh masyarakat lain harga tanah yang mereka ambil masih bisa naik. Silahkan ditunggu saja dulu” (WW/KD/AS/L/42/23).

Kekeliruan yang terjadi menyebabkan terjadinya konflik baru antara masyarakat dan pemerintah hingga beberapa kali sampai ke pihak berwajib, namun hingga saat ini belum ada titik terang dari persoalan tersebut. Banyak masyarakat yang menyangkan akan hal ini, berkenaan pada ketidakpastian terhadap ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang belum memperoleh haknya dan juga bagi masyarakat yang terhasut omongan masyarakat lain terkait harga tanah yang tidak sesuai dengan nilai jualnya.

“Hingga detik ini, Bendungan Karalloe sudah berjalan sesuai fungsi yang diharapkan, bisa menampung air dengan maksimal, mencegah terjadinya banjir, aliran air bagi persawahan sekitar. Jadi paling yang menjadi masalah sekarang ya ganti rugi pembebasan lahan beberapa masyarakat saja” (WW/HR/L/32/23).

Berdasarkan penuturan salah satu staf pengelola Bendungan Karalloe menjelaskan Bendungan Karalloe sejak dua tahun terakhir beroperasi tidak memiliki kendala apa-apa yang berarti namun terlepas dari itu pembangunan Bendungan Karalloe juga memiliki sisi negatif seperti konflik pembebasan

lahan pada proses pembangunannya. Masyarakat yang sampai detik ini masih tidak menerima uang ganti rugi dari hak tanah kepemilikan masih berharap ada titik terang yang dapat mereka peroleh.

Bendungan Karalloe dapat mengalami disfungsi pada bagian kinerja bangunan apabila mengalami kerusakan dan tidak ada pengawasan dari pihak pengelola sebagai penanggung jawab.

3. Implikasi Teori dan Kebijakan Dalam Penelitian Keberadaan Pembangunan Bendungan Karalloe Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Dalam Tinjauan *Enviromental Ethics*)

Keberadaan bendungan Karalloe merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa poin utama dalam pengerjaannya untuk mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan. Apabila dilihat pada fungsinya, bendungan memiliki segudang manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti pembangkit listrik, irigasi pertanian, penampungan air, pengendali banjir, bahkan ada yang difungsikan juga sebagai tempat wisata.

“Sejak awal dibangun, bendungan ini memang diperuntukkan untuk mengairi sawah di Kabupaten Jeneponto sekitar tujuh ribu empat hektar” .(WW/HR/PG/L/32/23).

Dengan ragam manfaat yang ada menjadikan pembangunan bendungan menjadi salah satu kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi melihat musim kemarau

yang akhir-akhir ini menyebabkan kekeringan pada sebagian daerah di Indonesia menjadi satu permasalahan yang harus segera dipecahkan. Dampak domino yang sebabkan oleh kekeringan tidak hanya pada kebutuhan akan air bersih, namun juga berdampak pada kebutuhan akan pertanian yang nantinya berimbas pada perkenomian warga.

Pembangunan bendungan Karalloe di Kecamatan Biringbulu yang kedepannya akan berfungsi pada irigasi pertanian Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu daerah kering di Sulawesi Selatan merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah melalui beberapa kajian sebelumnya.

“Setelah melalui beberapa kajian, seperti teknis, sosial, lingkungan dan lain-lain terutama komponen utama dari tubuh bendungan mudah didapatkan tidak jauh dari lokasi bendungan” (WW/HR/PG/L/32/23).

Dengan begitu, dalam proses pembangunan bendungan Karalloe tentu membutuhkan kajian kemprehensif yang mendalam agar meminimalisir dampak lingkungan yang akan terjadi melalui pengawasan ketat dari ahli bertaraf nasional dan internasional. Demi kelancaran pembangunan bendungan Karalloe tentu memerlukan daratan yang laus untuk mencakup bagian dari bendungan Karalloe, namun permasalahan muncul sebab lahan yang akan digunakan sebagai bagian dari bendungan Karalloe merupakan kepemilikan masyarakat setempat. Maka dalam proses pembebasan lahan,

pemerintah bekerja sama dengan perusahaan penanggung jawab harus dilakukan dengan jalan yang benar.

Dalam proses pembangunan bendungan Karalloe memperhatikan aspek lingkungan sebab tidak tepat sebuah kebijakan yang diterapkan jika hanya berfokus pada satu keuntungan misalnya keuntungan ekonomi. Perlu menimbang agar tidak mengalami kerugian secara material maupun nonmaterial, terlebih apabila menguntungkan sebagian pihak namun harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan makhluk hidup.

Berdasarkan pemaparan Kepala Desa Taring :

“Kami sebagai pemerintah desa berbahagia menyambut pembangunan bendungan ini, karena tentu juga pasti membawa dampak baik bagi desa kami seperti jalanan diaspal”(Wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2023).

Dampak baik yang dimaksud oleh pemerintah setempat juga pada perbaikan akses jalanan yang menghubungkan beberapa desa antara Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto. Mengingat, dahulu kondisi jalanan Desa Taring khususnya di sekitar sungai Kelara begitu rusak dan sempit. Hal ini tentu membawa pengaruh baik bagi akses transportasi di daerah tersebut.

B. Pembahasan

1. Keadaan Lingkungan Masyarakat Terhadap Keberadaan Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan Enviromental Ethics

Keberadaan Bendungan Karalloe merupakan sebuah gebrakan baru yang dilakukan oleh pemerintah didaerah tersebut, dengan berbagai pertimbangan yang menjadikan lokasi Sungai Kelara dipilih sebagai pusat pembangunan Bendungan Karalloe. Dengan pembangunan Bendungan Karalloe memicu berbagai aspek yang terjadi bagi lingkungan sekitar, sebagaimana yang telah dipahami bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar kehidupan manusia yang tinggal secara bersama dan saling mempengaruhi satu sama lain baik lingkungan terhadap manusia maupun manusia terhadap lingkungan.

Melalui konsep saling mempengaruhi satu sama lain maka jelas bahwa tidak hanya lingkungan yang akan memberikan manfaat bagi manusia namun lebih dari pada itu adalah bagaimana manusia mampu menunjukkan sikap kepeduliaanya terhadap lingkungan sehingga lingkungan dapat dinikmati bagi generasi mendatang. Ilmu tentang pentingnya menjaga lingkungan tidak hanya berada pada disiplin ilmu sosiologi saja, namun juga terdapat pada ajaran agama Islam seperti pada firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 :

mengatakan konsep modernitas dalam “*The Juggernaut Of Modernity*”. Dalam pernyataannya, Giddens mengatakan bahwa modernitas layaknya sebuah kendaraan besar yang akan terus melaju, menggiring masyarakat untuk terus berlari menuju masa depan (Primadata & Kusumawati, 2014).

b. Penanaman seribu pohon

Keberadaan bendungan Karalloe dengan mempertimbangkan aspek lingkungan sejak awal dibangun merupakan suatu langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Sebab lingkungan merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungan memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk menikmati manfaat lingkungan tersebut tidak hanya pada generasi hari ini namun juga pada generasi selanjutnya.

Kebijakan penanaman seribu pohon dan pengelolaan lingkungan sekitar bendungan Karalloe merupakan langkah dan bagian dari perhatian pemerintah terhadap eksistensi lingkungan berdasarkan strategi membangun etika lingkungan (*enviromental ethics*) hal tersebut menunjukkan sikap dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan (Rusdina, 2015) seperti yang pada penjelasan berikut :

- a) Manusia memiliki kewajiban menghormati alam semesta. Alam bukan hanya dipandang mampu memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga lebih dari pada itu mengandung nilainya sendiri. Jika kebutuhan mengharuskan manusia untuk mencapuri proses alam, maka jawabannya adalah dengan tidak mengeksploitasi dan berlebihan dalam penggunaannya.
- b) Manusia harus menumbuhkan kesadaran tanggung jawab terhadap lingkungan lokal sendiri, agar lingkungan bersih dan terjaga keasriannya.
- c) Manusia harus memiliki kesadaran tentang tanggung jawab terhadap biosefer. Dalam hal ini, manusia harus sadar bahwa mereka juga termasuk dalam biosfer yang merupakan bagian dari ekosistem sehingga tidak boleh mengganggu sistem keseimbangannya.
- d) Solidaritas dengan generasi mendatang harus menjadi patokan dalam pengelolaan hidup.
- e) Etika lingkungan hidup baru berisi larangan keras untuk mengotori, merusak, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyianyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian maupun keseluruhan.
- f) Perlu diperhatikan proporsionalitas. Dalam hal ini, pembangunan jelas sedikit banyak akan merubah lingkungan.

Sehingga dalam hal ini harus diperhatikan urgensi suatu program pembangunan dengan akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

2. Dampak Bendungan Karalloe Dalam Tinjauan Fungsi dan Disfungsi

Bendungan merupakan bangunan kokoh yang dibangun diatas permukaan sungai yang membentang luas membendung bibit air untuk berbagai keperluan daerah sekitar. Dalam pembangunan sebuah bendungan membutuhkan pemikiran dan ketelitian agar fungsi bendungan tepat sasaran. Keberadaan bendungan dengan fungsi yang diberikan ini, bukan hanya diperuntukkan bagi kehidupan saat ini namun dalam jangka waktu yang panjang sehingga hal ini berkenaan dalam teori pembangunan berkelanjutan yang memiliki prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan tiga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terlihat pada hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

a) Prinsip ekonomi

Pembangunan bendungan Karalloe menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan dengan fungsi utama bendungan yaitu untuk menjadi saluran irigasi bagi masyarakat sekitar khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto. Tentu kondisi menguntungkan dengan hasil panen yang dapat diperoleh dengan maksimal karena pasokan air yang

tersedia. Masyarakat yang mulanya terkendala pada ketersediaan air untuk mengairi sawah mereka kini kian membaik. Alhasil masyarakat dapat menanam padi di sawah mereka terhitung tiga kali setahun. Selain banyak memiliki manfaat bagi saluran irigasi, Bendungan karalloe juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Banyak yang mulanya bekerja semrawut kini bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Diantara pekerjaan yang didapatkan termasuk satpam, *cleening servis*, staff pengelolah, hingga manager.

b) Prinsip sosial

Keberadaan Bendungan Karalloe merupakan hal baru bagi masyarakat sekitar, meski beberapa diantara masyarakat banyak yang tidak sepakat namun tak sedikit pula yang bersuka cita menyambut bendungan Karalloe ini. Gaya arsitektur dan keindahan bangunan menambah rasa bangga terhadap masyarakat sekitar, masyarakat banyak yang menganggap daerah mereka istimewa sehingga dibangun sebuah bendungan yang kokoh. Dari rasa bangga yang dirasakan oleh masyarakat sekitar memunculkan perasaan ingin merawat, menjaga, dan memelihara bendungan tersebut agar dapat berdiri kokoh sepanjang masa.

c) Prinsip lingkungan

Keberadaan Bendungan Karalloe tidak mampu memaksimalkan prinsip ekonomi maupun sosial apabila prinsip lingkungan ditiadakan. Dalam artian, perhatian terhadap lingkungan dalam pembangunan bendungan ini menjadi poin utama terselenggaranya dengan baik. Dalam pembangunan Bendungan Karalloe mau tidak mau tentu mengeksploitasi lingkungan, hal ini tentu harus diatasi. Solusi yang dilakukan adalah dengan penanaman seribu pohon pasca peresmian bendungan. Dengan harapan, pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh subur sehingga kembali menghijaukan daerah sekitar yang digunduli dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Adapun fungsi Bendungan Karalloe yaitu :

1) Sumber air lahan irigasi Kabupaten Jeneponto

Fungsi ini berkaitan pada prinsip ekonomi dalam teori pembangunan berkelanjutan, yakni masyarakat Jeneponto sebagai masyarakat yang paling banyak diuntungkan sebab aliran sungai Kelara tersebut yang merupakan lokasi utama Bendungan Karalloe berfokus pada daerah Kabupaten Jeneponto. Kemungkinan peningkatan taraf perekonomian dapat dilihat pada jumlah panen yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto.

2) Penanggulangan banjir

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang tidak terduga. Banjir terjadi karena bibit air yang meningkat dan tidak dapat dibendung sehingga meluap hingga masuk kepemukiman warga. Peristiwa seperti ini tentu bukanlah sebuah keuntungan justru mendatangkan kerugian baik itu materi maupun korban jiwa. Melalui hal tersebut, Bendungan Karalloe dibangun juga untuk meminimalisir terjadinya banjir disetiap musim hujan. Rasa aman yang diperoleh masyarakat menjadi sebuah rasa syukur yang tidak ternilai sehingga hal berkaitan pada prinsip sosial dalam teori pembangunan berkelanjutan.

3) Membuka lapangan pekerjaan

Mempeoleh pekerjaan yang baik merupakan harapan setiap individu agar kebutuhan setiap hari dapat terpenuhi. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Taring khususnya di daerah sekitar pembebasan lahan Bendungan Karalloe, seperti bertani, buruh tani, dan lain sebagainya. Namun jelas hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi dengan maksimal karena adanya pembebasan lahan. Bagi masyarakat yang tetap berada dan tinggal disekitar bendungan Karalloe memiliki kesempatan untuk berkeja di kawasan bendungan Karalloe tersebut. Banyak masyarakat yang merasa bersyukur karena mendapatkan kesempatan

bekerja di bendungan tersebut. Meskipun tidak bekerja secara tetap namun pembangunan bendungan ini terhitung lama, sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkannya untuk bekerja sebagai tukang batu.

3. Implikasi Teori Dan Kebijakan Dalam Penelitian Keberadaan Bendungan Karalloe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Dalam Tinjauan Enviromantel Ethics)

Pembangunan Bendungan Karalloe dengan fungsi sebagai saluran irigasi bagi Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya, kebijakan ini berdasarkan pertimbangan dan analisa konkret yang dilakukan pemerintah dalam menentukan keputusan. Namun masih terdapat kekhawatiran kebijakan ini akan merusak lingkungan alami yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini tentu membutuhkan kajian mendalam dari para pemangku kebijakan dengan menjamin terjaganya kondisi yang ada serta kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2013, perencanaan pembangunan Bendungan Karalloe sudah menjadi proyek dengan melakukan berbagai upaya untuk melancarkan proses pembangunan Bendungan Karalloe. Dalam hal ini, kelancaran pembangunan bendungan membutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka memperluas wilayah dan memaksimalkan pembangunan bendungan, pemerintah dan pengelola melakukan pembebasan lahan yang ada disekitar bendungan, khususnya bagi Dusun

Pa'lopiang. Mengingat lokasi Dusun Pa'lopiang merupakan tempat yang menjadi pusat utama pembangunan bendungan sehingga mau tidak mau harus dilakukan pembebasan lahan.

Menyikapi pembangunan bendungan dengan melakukan pembebasan lahan tentu dibutuhkan kesediaan dan keikhlasan dari masyarakat setempat untuk menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah, dalam hal ini masyarakat mendukung penuh pembangunan bendungan dengan menyerahkan tanah kepemilikan mereka untuk dialihfungsikan menjadi lahan pembangunan, begitu pula dengan pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat yang terdampak dari adanya pembangunan bendungan ini. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa masyarakat yang tidak memperoleh ganti rugi atas hak tanah beserta benda yang terdapat di atasnya.

Pembebasan lahan yang dilakukan mengakibatkan penggundulan bukit dan area hijau sekitar kawasan bendungan, hal ini menimbulkan ketakutan mengingat daerah sekitar merupakan dataran tinggi yang memiliki resiko longsor yang lebih besar. Namun, saat Bendungan Karalloe diresmikan pemerintah melakukan reboisasi dengan menanam seribu jenis pohon dan tumbuhan yang tersebar diseluruh kawasan bendungan.

Dalam teori *sustanaible development*, sebuah pembangunan harus memikirkan kondisi lanjutan yang akan terjadi. Dalam artian,

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola merupakan langkah untuk meningkatkan stabilitas bendungan agar berfungsi maksimal tanpa mencederai kondisi lingkungan sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan dimasa yang akan datang.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Keberadaan Bendungan Karalloe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Dalam Tinjauan *Enviromental Ethics*), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Keadaan lingkungan masyarakat terhadap keberadaan bendungan karalloe dalam tinjauan *enviromental ethics* ditunjukkan dengan kajian yang dilakukan pemerintah dan pengelolah sebelum melaksanakan proses pembangunan bendungan seperti uji kelayakan lingkungan dengan memenuhi standar nasional. Adapun langkah yang ditempuh untuk menyukseskan pembangunan dengan melakukakan pembebasan lahan dan penanaman seribu pohon sebagai upaya mengembalikan kondisi lingkungan yang rindang dan sejuk.
2. Bendungan Karalloe dalam tinjauan fungsi dan disfungsi dapat dilihat pada fungsi Bendungan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Taring dan masyarakat Kabupaten Jeneponto seperti terkendalnya cadangan air yang akan disalurkan untuk irigasi persawahan yang memungkinkan meningkatnya intensitas panen dalam setahun. Selain itu juga Bendungan Karalloe juga memiliki fungsi sebagai pengendali banjir, kondisi cuaca pada masim hujan setiap tahunnya

menyebabkan meningkatnya bibit air sungai. Hal ini seringkali mengakibatkan banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat yang terdampak. Korbannya dapat berupa harta benda maupun korban jiwa. Hal ini menjadi acuan penting bagi pembangunan Bendungan Karalloe agar menjadi solusi yang signifikan dalam mengendalikan banjir terbukti dalam dua tahun terakhir banjir tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Fungsi selanjutnya adalah sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, pembangunan Bendungan Karalloe membutuhkan waktu yang lumayan panjang kurang lebih delapan tahun pengerjaan sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang batu, tak sedikit pula yang bekerja sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi yang bagus hingga saat ini.

3. Implikasi teori dan kebijakan dalam penelitian keberadaan Bendungan Karalloe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dapat terlihat pada perhatian yang dilakukan pemerintah sebelum membangun Bendungan Karalloe seperti memperhatikan lingkungan sekitar, serta kebijakan apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembangunan bendungan, serta respon masyarakat yang begitu juga

dengan pemerintah setempat dalam menyambut pembangunan Bendungan Karalloe sebab pembangunan Bendungan Karalloe dinilai mendatangkan dampak baik bagi daerah tersebut seperti perbaikan akses transportasi dan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Desa Taring

Melalui keberadaan Bendungan Karalloe ini kiranya dapat dijadikan sebagai acuan perubahan kearah yang lebih baik dengan memanfaatkan keberadaan Bendungan Karalloe tanpa merusak sistem lingkungan yang ada. Akan tetapi menjaga dan merawat agar Bendungan Karalloe dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya dimasa kini namun juga dimasa yang akan datang.

2. Bagi masyarakat

Keberadaan Bendungan Karalloe merupakan kesempatan yang luar biasa diperoleh didaerah tersebut, sehingga masyarakat menjadikan Bendungan Karalloe sabagai tempat bekerja dengan memanfaatkan kondisi yang ada seperti dengan banyaknya masyarakat luar yang berkunjung ke sekitar Bendungan Karalloe dapat dijadikan tempat usaha

misalnya dengan membuka warung makan, atau sekedar menjual oleh-oleh khas daerah tersebut.

3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi atau sumber terkait kajian keberadaan bendungan apabila ditinjau dari kajian *enviromental ethics*. Peneliti juga diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dalam melakukan penelitian seperti pengumpulan data sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Y. S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. *Jurnal Politikom Indonesia*, 3(2), 187–195.
- Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado. *Sosietas*, 6(2), 1–8. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4248>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Duran, D. C., Gogan, L. M., Artene, A., & Duran, V. (2015). The Components of Sustainable Development - A Possible Approach. *Procedia Economics and Finance*, 26(15), 806–811. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00849-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00849-7)
- Ermawati, E., Husaini, A., & Pakkawaru, I. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Kuota Internet Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 36–58. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.22.36-58>
- Ferijal, T., Batelaan, O., & Shanafield, M. (2021). Rainy season drought severity trend analysis of the Indonesian maritime continent. *International Journal of Climatology*, 41(S1), 1–38. <https://doi.org/10.1002/joc.6840>
- Hapsoro, N. A., & Bangun, K. (2020). Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat Dari Aspek Ekonomi Di Indonesia. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.30998/lja.v3i2.7046>
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Klarin, T. (2018). The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *Zagreb International Review of Economics and Business*, 21(1), 67–94. <https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0005>
- Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Sustainable Development dan CSR. *CSR, Sustainability, Ethics and Governance*, 231–237. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97649-5_2
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D

- Maria Lawalata, G. (2013). Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan. *Agustus*, 13(2), 115–124.
- Mohd Ishak, N., & Abu Bakar, A. Y. (2014). Developing Sampling Frame for Case Study: Challenges and Conditions. *World Journal of Education*, 4(3), 29–35. <https://doi.org/10.5430/wje.v4n3p29>
- Muhar, J. (2017). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 373–390.
- Prathama, A., Nuraini, R. ., & Firdausi, Y. (2020). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Prespektif Lingkungan (Studi kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 1(3), 29–38. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738315000444>
- Primadata, A. P., & Kusumawati, D. K. (2014). Modernisasi Pendidikan Di Indonesia Sebuah Perspektif Sossilogis Terhadap Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 25–51.
- Purwanti, D. (2017). Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Dan Implementasinya. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 1(2), 14–20. <https://doi.org/10.20961/jdc.v1i2.17622>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Arita L (ed.)). <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56.
- Raho, B. (2016). *Sosiologi*.
- Rakhim, A., & Sirajuddin, A. (2020). Evaluasi Perencanaan Teknis dan Analisa Stabilitas Konstruksi Tubuh Bendungan Karalloe. *Jurnal Teknik Hidro*, 13(1), 18–27.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 82–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
- Rusdina, A. (2015). Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Istek*, 9(2), 244–263.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal*

Hukum, 12(1), 39–60. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>

- Setyaningsih, W., Sriyono, & Benardi, A. (2018). Kajian Kerusakan Lahan Di Daerah Aliran Sungai (Das) Kreo Akibat Pembangunan Pemukiman Di Sekitar Waduk Jatibarang Kota Semarang. *Media Komunikasi Geografi*, 19(2), 177–186. <https://doi.org/10.23887/mkg.v19i2.16027>
- Shiamah, L. N., & Nawiyanto. (2020). Pengaruh Bendungan Wlingi Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Masyarakat di Sepanjang Sluran Irigasi Lodoyo Tulungagung Tahun 1970-1990. *Historia*, 2(2), 187–199. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Simatupang, S. A., Tana, B., & Lukman, M. (2020). Tinjauan Perencanaan Terowongan Pengelak Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa. *Paulus Civil Engineering Journal*, 2(1), 63–69. <https://doi.org/10.52722/pcej.v2i1.123>
- Syam, I., Syatriani, S., & Saputri, A. S. D. (2021). Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana. *Jurnal Gesit*, 11(1), 21–28.
- Urry, J., & Novenanto, A. (2017). Sosiologi Ruang dan Tempat. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 1(1), 17–35. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2017.001.1.03>
- Yanti, R., & Ibrahim, H. (2018). Kajian Sosiologi Perilaku Konservasi dengan Wanatani Wilayah Semi Arid Khatulistiwa (Studi Kasus: di Kecamatan Amarasi, NTT). *Journal of Applied Agricultural Science and Technology*, 2(2), 55–71. <https://doi.org/10.32530/jaast.v2i2.46>

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Kepala Desa Taring

PEDOMAN WAWANCARA STUDI KASUS KEBERADAAN BENDUNGAN KARALLOE DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA (DALAM TINJAUAN *ENVIROMENTAL ETHICS*)

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

NO	PERTANYAAN
1	Kapan Bendungan Karalloe mulai dibangun ?
2	Apa yang mendasari pembangunan Karalloe ?
3	Bagaimana pemerintah setempat mengsosialisasikan terhadap pembangunan Bendungan Karalloe ?
4	Bagaimana langkah pemerintah dalam menentukan kebijakan dibangunnya Bendungan Karalloe di daerah Desa Taring ini ?
5	Bagaimana respon masyarakat menyikapi pembangunan Bendungan Karalloe ?
6	Tantangan apa yang dihadapi dalam pembangunan Bendungan Karalloe ?
7	Sebelum Bendungan Karalloe dibangun, masyarakat sekitar sering melakukan aktivitas apa disekitar Sungai Kelara ?
8	Bagaimana kondisi lingkungan sekitar sebelum dibangun Bendungan Karalloe ?
9	Bagaimana kondisi lingkungan sekitar setelah dibangun Bendungan Karalloe?
10	Apa saja fungsi Bendungan Karalloe ?
11	Selama Bendungan Karalloe beroperasi apakah fungsi yang dijelaskan tersebut telah terlaksana sebagaimana mestinya ?
12	Apakah terjadi dampak negatif dari pembangunan Bendungan Karalloe ?

13	Jika ada apa saja dampak negatif tersebut ?
14	Jika dilihat pada aspek etika lingkungan/enviromental ethics, apakah pembangunan Bendungan Karalloe sudah sesuai?



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Petugas Operasi Bendungan Karalloe

PEDOMAN WAWANCARA STUDI KASUS KEBERADAAN BENDUNGAN KARALLOE DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA (DALAM TINJAUAN *ENVIROMENTAL ETHICS*)

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

NO	PERTANYAAN
1	Sejak kapan Bendungan Karalloe dibangun?
2	Apa yang mendasari pembangunan Bendungan karalloe ?
3	Mengapa pembangunan Bendungan Karalloe berlokasi didaerah ini?
4	Apakah pembangunan Bendungan Karalloe telah lebih dulu mempertimbangkan kondisi lingkungan?
5	Apakah pengaruh Bendungan Karalloe bagi lingkungan sekitar?
6	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses pembangunan Bendungan Karalloe agar tetap menjaga lingkungan ?
7	Apa fungsi Bendungan Karalloe ?
8	Selama Bendungan Karalloe beroperasi, perubahan apa saja yang terjadi bagi kehidupan masyarakat sekitar ?
9	Apakah terjadi disfungsi pada Bendungan Karalloe?
10	Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan Bendungan Karalloe ?
11	Selama Bendungan Karalloe beroperasi apakah fungsi yang dijelaskan tersebut telah terlaksana sebagaimana mestinya ?
12	Apakah terjadi dampak negatif dari pembangunan Bendungan Karalloe ?

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA STUDI KASUS KEBERADAAN BENDUNGAN KARALLOE DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA (DALAM TINJAUAN *ENVIROMENTAL ETHICS*)

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

NO	PERTANYAAN
1	Sejak kapan anda tinggal di daerah ini ?
2	Apakah anda mengetahui Bendungan Karalloe ?
3	Bagaimana respon anda terhadap rencana pembangunan Bendungan Karalloe ?
4	Apakah anda merasa terganggu dengan keberadaan Bendungan Karalloe ?
5	Bagaimana keadaan daerah sekitar sebelum dibangun Bendungan Karalloe ?
6	Kegiatan apa saja yang sering dilakukan oleh masyarakat di sungai sekitar Bendungan Karalloe sebelum dibangun?
7	Apakah kegiatan tersebut masih dilakukan sampai sekarang ?
8	Apa manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar sejak dibangunnya Bendungan Karalloe ?
9	Apa dampak negatif yang anda rasakan dari keberadaan Bendungan Karalloe ?
10	Bagaimana anda melihat lingkungan sekitar dengan adanya Bendungan Karalloe?
11	Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan Bendungan Karalloe ?

DOKUMENTASI PENELITIAN

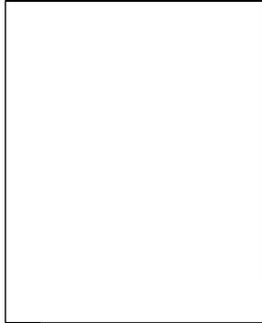








RIWAYAT HIDUP



Yuyun Karlina, lahir di Kabupaten Jeneponto tepatnya di Desa Bontomate'ne Kecamatan Turatea, Kamis 24 Februari 2023. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Arfah Daeng Sewang dan ibunda Ridawati Daeng Kebo'. Penulis pertama kali masuk ke Pendidikan formal di Mis Yapit Pencong pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 masuk ke Mts Darul Ihsan Munte dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan Pendidikan ke Ma Darul Ihsan Munte dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 diterima sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Sosiologi. Semasa kuliah penulis aktif di organisasi intra kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu HIMA Prodi Pendidikan Sosiologi periode 2019/2020. Penulis menyelesaikan studi strata satu pada tahun 2021, dan melanjutkan pendidikan untuk jenjang strata dua pada tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Pascasarjana jurusan Magister Pendidikan Sosiologi .

